



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI KOTA SEHAT
TAHUN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suatu kondisi Kota Denpasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh setiap penduduk perlu penyelenggaraan Kota Sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota diperlukan Rencana Aksi Kota Sehat Kota Denpasar Tahun 2017-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Kota Sehat Tahun 2017 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000, tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Sehat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/XX/2003 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VI/2008 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2017-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI
KOTA SEHAT TAHUN 2017-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Rencana Aksi Kota Sehat Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Sehat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Rencana Aksi Kota Sehat Kota Denpasar Tahun 2017 – 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rencana Aksi Kota Sehat Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar dalam melaksanakan program-program Kota Sehat.

BAB III

SISTIMATIKA PENULISAN

Pasal 4

Rencana Aksi Kota Sehat Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI DAN PERMASALAHAN KESEHATAN
DI KOTA DENPASAR
BAB III : LANDASAN PELAKSANAAN
BAB IV : RENCANA AKSI MEWUJUDKAN KOTA
DENPASAR SEHAT
BAB V : PELAKSANAAN
BAB VI : RENCANA AKSI KOTA SEHAT
BAB VII : PENUTUP

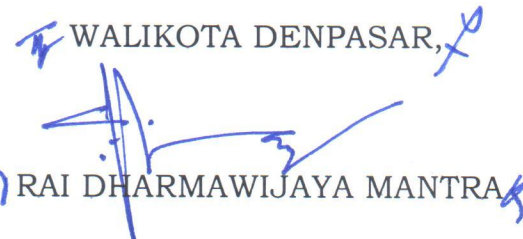
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Juni 2017

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 28



Kata Pengantar

Om Swastiastu.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, Rencana Aksi Kota Sehat telah dapat kami susun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2017-2021 khususnya misi nomor empat yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (*welfare society*). khususnya dalam bidang peningkatkan pelayanan kesehatan.

Upaya mewujudkan visi dan misi Kota Sehat ini telah kami padukan dengan pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, visi dan misi Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) tahun 2030, dibidang kesehatan. Dengan demikian apa yang dicantumkan dalam rencana aksi ini merupakan pencapaian dari target-target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar tahun 2017-2021 dan juga pencapaian target pembangunan kesehatan tingkat Provinsi, dan Nasional.

Kami berterima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membangun dalam penyusunan Rencana Aksi Kota Sehat ini, terutama anggota. Mudah-mudahan apa yang sudah disumbangkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan Denpasar sebagai Kota Sehat.

Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar untuk bersama-sama mewujudkan Denpasar sebagai Kota yang Sehat guna mendukung Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan.

WALIKOTA DENPASAR,

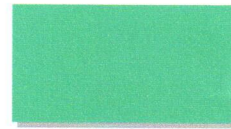
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



Daftar Isi

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Tujuan dan sasaran	I-3
1.3.1. Tujuan	I-3
1.3.2. Sasaran	I-3
1.4. Sistematika	I-4
BAB 2 GAMBARAN UMUM	II-1
2.1. Profil Kota Denpasar.....	II-1
2.1.1. Letak dan Administrasi Kota Denpasar	II-1
2.1.2. Topografi dan Kemiringan Lereng	II-2
2.1.3. Klimatologi	II-3
2.1.4. Geologi dan Jenis Tanah	II-3
2.1.5. Hidrologi	II-4
2.2. Kondisi Penduduk	II-4
2.2.1. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk	II-4
2.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	II-5
2.2.3. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	II-5
2.2.4. Komposisi Penduduk Menurut Agama	II-5
2.2.5. Komposisi Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan	II-5
2.2.6. Mobilitas Penduduk	II-5
2.2.7. Proyeksi Jumlah dan Penyebaran Penduduk	II-8
2.3. Kondisi Ekonomi	II-10
2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-10
2.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	II-11
2.3.3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	II-11
2.3.4. Laju Inflasi	II-12
2.3.5. Identifikasi Kegiatan Perekonomian Perkotaan ...	II-13

2.3.6.	Perekonomian Sektor Internal Kota	II-13
2.4.	Kondisi Sosial Budaya	II-13
2.5.	Kondisi Penggunaan Lahan	II-14
2.6.	Pencapaian Derajat Kesehatan	II-16
2.6.1.	Akses Terhadap Sarana Kesehatan	II-16
2.6.2.	Akses Terhadap Sarana Kesehatan Lainnya	II-18
2.6.3.	Mutu Pelayanan Kesehatan	II-19
2.6.4.	Indikator Kesehatan	II-19
2.6.5.	Angka Kesakitan	II-22
2.6.6.	Status Gizi	II-24
2.6.7.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ..	II-24
2.6.8.	Umur Harapan Hidup	II-24
2.7.	Kelembagaan	II-25
BAB 3	Landasan Pelaksanaan	III-1
3.1.	Kota Sehat.....	III-1
3.1.1.	Pengertian Kota Sehat.....	III-1
3.1.2.	Aspek-aspek Dalam Pembangunan Kota Sehat ..	III-2
3.1.3.	Hubungan Kota Sehat dengan Pencapaian Visi & Misi	III-3
3.2.	Landasan Global dan Nasional	III-5
3.2.1.	MDG's	III-5
3.2.2.	RPJPMN	III-5
3.2.3.	RPJPMN 2015-2019	III-6
3.3.	Landasan Regional	III-6
3.3.1.	Kebijakan Pemerintah Provinsi	III-6
3.3.2.	RPJMD 2016-2021	III-8
3.4.	Indikator	III-8
BAB 4	Visi, Misi, Tujuan & Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan IV-1	
4.1.	Visi.....	IV-1
4.2.	Misi	IV-1
4.3.	Tujuan	IV-2
4.4.	Sasaran	IV-2
4.5.	Strategi	IV-3
4.6.	Arah Kebijakan	IV-4
4.7.	Prioritas	IV-6
BAB 5	Penutup	V-1



Daftar Tabel

Tabel 2.1.1	Luas Wilayah Administrasi Kota Denpasar	II-1
Tabel 2.1.2	Luas Wilayah Kota Denpasar Berdasarkan Ketinggian Tempat dan Kemiringan Tanah	II-2
Tabel 2.2.1	Jumlah, Petumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2012	II-5
Tabel 2.2.2	Mobilitas Penduduk Kota Denpasar Tahun 2012	II-6
Tabel 2.2.3	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2012.	II-7
Tabel 2.2.4	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar 2006-2030 (ass 3,2%/th).....	II-8
Tabel 2.2.5	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar 2006-2030 (ass 1,94%/th).....	II-8
Tabel 2.2.6	Proyeksi Penduduk Kota Denpasar 2006-2030 (ass 1,4%/th)	II-9
Tabel 2.3.1	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstanta (Hk) thn 2011-2014 Kota Denpasar	II-10
Tabel 2.3.2	PDRB Per Kapita Kota Denpasar tahun 2009-2013.....	II-11
Tabel 2.3.3	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstanta (Hk) tahun 2011-2014 Kota Denpasar	II-12
Tabel 2.3.4	Nilai Inflasi Rata-rata tahun 2011-2014 Kota Denpasar	II-12
Tabel 2.5.1	Ruang Pola Kota Denpasar.....	II-15
Tabel 2.5.2	Rencana Pola Ruang Kota Denpasar Tahun 2030.....	II-16
Tabel 2.6.1	Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar	II-17
Tabel 2.6.2	Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2014	II-17
Tabel 2.6.3	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010-2013	II-18
Tabel 2.6.4	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2013	II-18
Tabel 2.6.5	Data Ijin Sarana Kesehatan yang Dikeluarkan Selama Tahun 2013	II-18
Tabel 2.6.6	Angka Kematian Bayi	II-20
Tabel 2.6.7	Angka Kematian Ibu Maternal	II-21
Tabel 2.6.8	Angka Kematian Ibu	II-21
Tabel 2.6.9	Jumlah Penduduk yang Terjangkit DBD	II-23
Tabel 2.6.10	Gizi Buruk.....	II-24
Tabel 3.4.1	Indikator Tatanan Kota Sehat	III-8
Tabel 4.1	Matriks Rencana Aksi Mengembangkan kawasan	

	Permukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas.....	IV-7
Tabel 4.2	Matriks Rencana Mengembangkan kawasan industri, perkantoran, dan pariwisata yang berkelanjutan	IV-26
Tabel 4.3	Matriks Rencana Aksi Meningkatkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.....	IV-32
Tabel 4.4	Matriks Rencana Aksi Mewujudkan tata kelola kota sehat yang akuntabel, transparan, dan partisipatif	IV-49



Daftar Gambar

Gambar 2.1.1	Gambar Pembagian Administrasi Kota Denpasar	II-4
Gambar 2.6.1	Grafik Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS di Kota Denpasar Tahun 2008 s/d 2013	II-22
Gambar 3.1.1	Hubungan Pembangunan Kota Sehat dengan Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar	III-7

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan jaminan kesehatan masyarakat, pengembangan pelayanan puskesmas rumah sakit, serta regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan. Namun pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit menular dan tidak menular, hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi transisi epidemiologi, sehingga masyarakat saat ini menghadapi beban ganda.

Sementara itu berkembang pula *new emerging disease*, yaitu suatu penyakit yang terjadi akibat mutasi biologis dari bakteri maupun virus di lingkungan yang tidak sehat, atau terjadinya *reemerging disease*, yaitu penyakit lama kembali mengganas, antara lain demam berdarah yang disebabkan resistennya obat maupun pestisida dilapangan. Penyakit yang diderita oleh masyarakat tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan lingkungan, perilaku yang tidak kondusif serta pencemaran lingkungan dan faktor determinan lainnya.

Secara umum krisis ekonomi yang sejak Juli 1997 juga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin dari 15.489 jiwa pada tahun 2004 menjadi 16.368 jiwa tahun 2005 jumlah penduduk miskin membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, dan pendidikan, memburuknya kondisi prasarana dan sarana umum, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang termasuk mempengaruhi perilaku masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, Pemerintah Kota berpedoman pada landasan idil yaitu Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Denpasar.

Untuk lebih menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD ini, maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan kumpulan program kesehatan dan kegiatan yang komprehensif untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi serta ditentukan sasaran capaiannya. RAD disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga dapat lebih optimal hasilnya dalam "*Mewujudkan Denpasar Kota Sehat*".

Dalam mewujudkan Denpasar Kota Sehat harus mampu memenuhi tatanan sebagai kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat, kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri dan kehidupan sosial yang sehat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2017

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1 Tujuan

Tujuan Rencana Aksi Kota Sehat Kota Denpasar Tahun 2017– 2021 adalah menyiapkan rancangan pembangunan tahunan untuk tercapainya kondisi Kota untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat.

1.3.2 Sasaran

Sasaran dari pekerjaan Penyusunan Rencana Aksi Kota Sehat di Kota Denpasar adalah:

1. Terlaksananya Program Kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat.
2. Terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik.
3. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten/Kota tersebut secara mandiri.
4. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi iebih baik.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran kegiatan, landasan hukum, serta sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab profil Kota Denpasar menguraikan tentang kondisi Kota secara umum serta kondisi kesehatan Kota Denpasar. Diuraikan juga tentang kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, penggunaan lahan, pencapaian derajat kesehatan dan penggunaan lahan.

BAB III LANDASAN PELAKSANAAN

Meliputi pengertian Kota Sehat, landasan global dan nasional, landasan regional, dan indikator.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, dan maktrik Rencana Aksi Kota Denpasar Sehat.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari Rencana Aksi Kota Sehat Kota Denpasar yang akan dilaksanakan.

GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR

2.1 PROFIL KOTA DENPASAR

2.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi Kota Denpasar



Kota Denpasar memiliki wilayah daratan seluas 12.778 Ha yang terletak pada koordinat 08°36'20" - 08°44'48" LS dan 115°10'00" - 115°16'26" BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)

Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung

Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa

Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Secara administrasi terdiri dari 4 wilayah kecamatan yang terbagi menjadi 30 desa dan 13 kelurahan dengan total jumlah palemahan 35 (tiga puluh lima) buah desa pekraman seperti yang diuraikan pada **Tabel 2.1.1** dan **Gambar 2.1.1**.

Tabel 2.1.1
Wilayah Administrasi Kota Denpasar

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		Luas (Ha)	% Luas Wilayah
I	Denpasar Utara	1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142,00	1,11
		2	Desa Dangin Puri Kangin	75,00	0,59
		3	Kelurahan Tonja	230,00	1,80
		4	Desa Dangin Puri Kauh	72,00	0,56
		5	Desa Pemecutan Kaja	385,00	3,01
		6	Desa Ubung	103,00	0,81
		7	Desa Ubung Kaja	400,00	3,13
		8	Desa Dauh Puri Kaja	109,00	0,85
		9	Kelurahan Peguyangan	644,00	5,04
		10	Desa Peguyangan Kaja	536,00	4,19
		11	Desa Peguyangan Kangin	416,00	3,26
		Sub Jumlah		3.112,00	24,35
II	Denpasar Barat	1	Desa Padang Sambian Klod	412,00	3,22
		2	Desa Pemecutan Klod	450,00	3,52

		3	Desa Dauh Puri Kauh	190,00	1,49
		4	Desa Dauh Puri Klod	188,00	1,47
		5	Desa Dauh Puri	60,00	0,47
		6	Desa Dauh Puri Kangin	59,00	0,46
		7	Desa Pemecutan	186,00	1,46
		8	Desa Tegal Harum	50,00	0,39
		9	Desa Tegal Kertha	35,00	0,27
		10	Desa Padang Sambian	374,00	2,93
		11	Desa Padang Sambian Kaja	409,00	3,20
			Sub Jumlah	2.413,00	18,11
III	Denpasar Timur	1	Desa Dangin Puri Klod	142,00	1,11
		2	Desa Sumerta Klod	271,00	2,12
		3	Kelurahan Kesiman	266,00	2,08
		4	Desa Kesiman Petilan	290,00	2,27
		5	Desa Kesiman Kertalangu	405,00	3,17
		6	Kelurahan Sumerta	52,00	0,71
		7	Desa Sumerta Kaja	73,00	0,57
		8	Desa Sumerta Kauh	89,00	0,70
		9	Kelurahan Dangin Puri	65,00	0,51
		10	Kelurahan Penatih	281,00	2,20
		11	Desa Penatih Dangin Puri	320,00	2,50
			Sub Jumlah	2.254,00	17,64
IV	Denpasar Selatan	1	Desa Pemogan	971,00	7,60
		2	Desa Pedungan	749,00	5,86
		3	Desa Sesetan	739,00	5,78
		4	Desa Serangan	481,00	3,76
		5	Desa Sidakarya	389,00	3,04
		6	Kelurahan Panjer	359,00	2,81
		7	Kelurahan Renon	254,00	1,99
		8	Desa Sanur Kauh	386,00	3,02
		9	Kelurahan Sanur	402,00	3,15
		10	Desa Sanur Kaja	269,00	2,11
			Sub Jumlah	4.999,00	39,12
	KOTA DENPASAR		TOTAL JUMLAH	12.778,00	100,00

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031

2.1.2 Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kota Denpasar 59,1% berada pada ketinggian antara 0 – 25 m dpl, dan sisanya sampai 75 m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 – 2% ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 – 8%. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 – 15 %. Luas wilayah berdasarkan kemiringan dapat dilihat pada **Tabel 2.1.2** Landform wilayah Kota Denpasar pada bagian utara relief melandai, di beberapa tempat mempunyai relief berombak, kemudian ke selatan merupakan dataran fluvial.

Tabel 2.1.2
Luas Wilayah Kota Denpasar Berdasarkan Ketinggian Tempat dan Kemiringan Tanah (Ha)

Kecamatan	Ketinggian Tempat (DPL)			Kemiringan lereng	
Denpasar Selatan	4.999	-	-	4.999	-
Denpasar Timur	1.110,5	1.200	462,5	1.797	976
Denpasar Barat	1.600	1.025	2.384	4.218	788
KOTA DENPASAR	7.709,5	2.225	2.846,5	11.014	1.764

Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, dengan Modifikasi

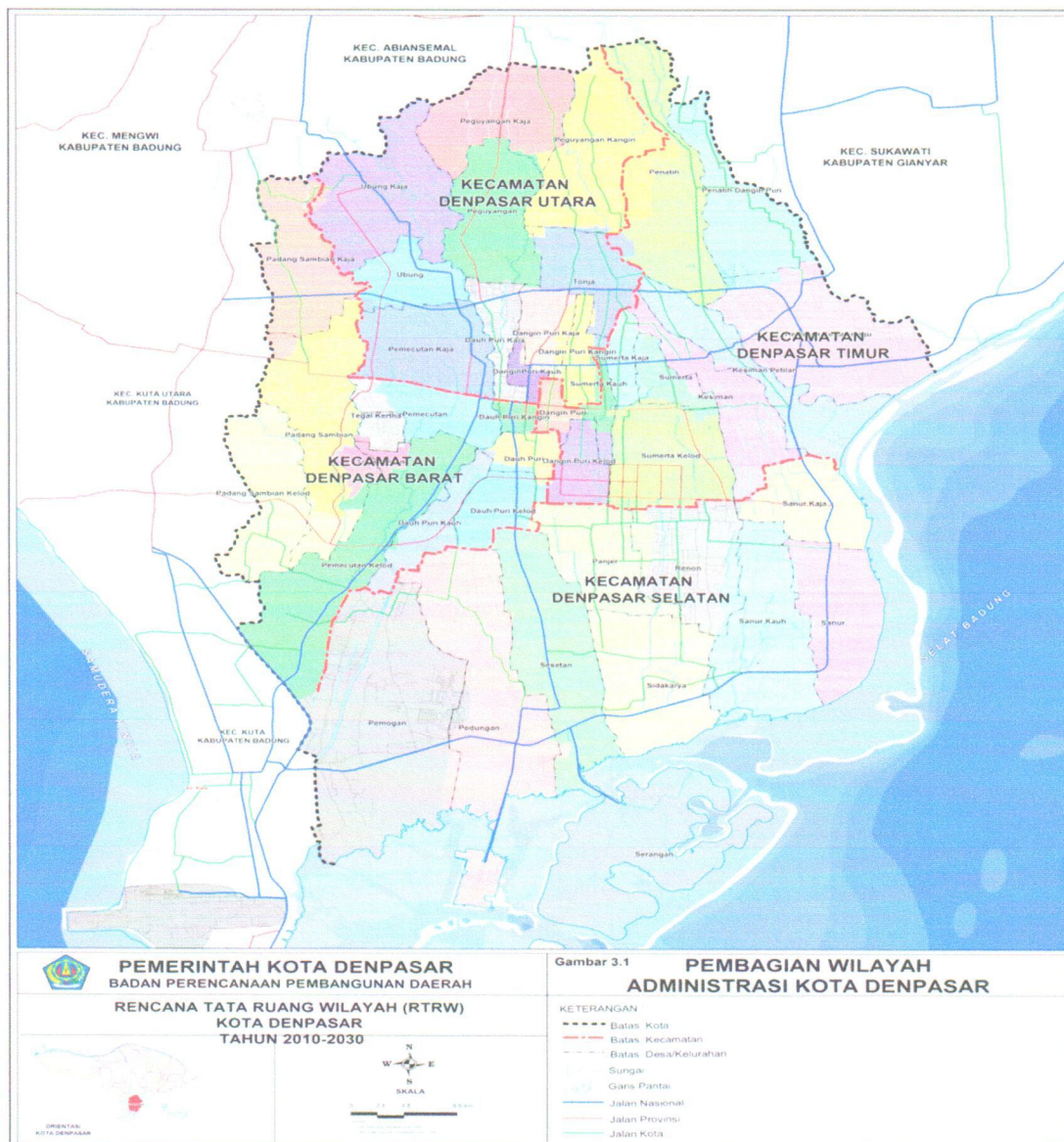
2.1.3 Klimatologi

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi angin musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan Juni sampai September, dan musim hujan dengan angin barat antara bulan September sampai Maret dan diselingi musim pancaroba dengan curah hujan berkisar antara 0 - 406 mm dan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 406 mm. Pada tahun 2014 rata-rata suhu Kota Denpasar sebesar 27,0°C. Kota Denpasar juga memiliki kelembaban udara rata-rata sebesar 81% dengan curah hujan sebesar 2.026,2 mm dan kecepatan angin berembus sebesar 7 knot.

2.1.4 Geologi dan Jenis Tanah

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kwarter, kwarter bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batuan adalah sebagai berikut :

1. Batuan vulkanik kwarter menutupi sekitar 70% wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan.
2. Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar.



Gambar 2.1.1

Peta Pembagian Administrasi Kota Denpasar

Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

2.1.5 Hidrologi

Di wilayah Kota Denpasar, potensi sumber daya air dapat disebutkan lengkap meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut.

2.2 KONDISI KEPENDUDUKAN

2.2.1 Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2012 sebanyak 680.900 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 8,38% dan kepadatan penduduk 5.329 jiwa/km². Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi yaitu berada di Kecamatan Denpasar Barat. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu di Kecamatan Denpasar Timur. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Timur, sedangkan terendah di Kecamatan Denpasar Utara.

Tabel 2.2.1
Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2012

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1	Denpasar Utara	31,12	171.280	7,07	5.504
2	Denpasar Timur	22,54	128.384	11,13	5.696
3	Denpasar Selatan	49,99	184.628	7,67	3.693
4	Denpasar Barat	24,13	196.608	7,66	8.148
	Total	127,78	680.900	8,38	5.329

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2012

2.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk di Kota Denpasar baik perempuan dan laki-laki memiliki proporsi yang hampir sama yaitu untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 344.467 jiwa (50,59%) sedangkan jumlah penduduk perempuan yaitu 336.433 jiwa (49,41%).

Bila dilihat berdasarkan umur penduduk, maka dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15–54 tahun) dan usia tua (55-60+ tahun). Jumlah penduduk usia produktif merupakan jumlah terbanyak yaitu 457.853 jiwa (67,24%), sedangkan untuk usia muda yaitu 129.384 jiwa (19,00%) dan usia tua yaitu 93.661 jiwa (13,76%).

2.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan memegang peran penting dalam pembangunan wilayah. Komposisi penduduk menurut pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dari kualitas penduduk, lebih-lebih penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja. Berdasarkan data hasil SUSENAS 2005 (BPS,2006) jumlah penduduk Denpasar yang tergolong angkatan kerja adalah 471.640 orang (82,03% dari jumlah penduduk).

Diantara angkatan kerja tersebut, sebagian besar ada pada kelompok pendidikan sekolah menengah atas (36,15%) dan lainnya ada pada kelompok pendidikan sekolah dasar dan tidak tamat sekolah dasar (32,26%).

2.2.4 Komposisi Penduduk Menurut Agama

Hasil pendataan SUSENAS di Kota Denpasar tahun 2000 menunjukkan jumlah penduduk Kota Denpasar yang beragama Hindu mencapai 82,73% dari jumlah penduduk, Islam 6,89 persen, dan penduduk dengan agama lainnya rata-ratasekitar 1 persen. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan data tahun 2005, persentase penduduk yang beragama Hindu telah melorot menjadi 63,41% (turun rata-rata 3,86 persen setahun), sementara penduduk beragama Islam meningkat menjadi 26,13% (meningkat rata-rata 3,85% setahun).

2.2.5 Komposisi Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Mata pencaharian Penduduk Kota Denpasar sebagian besar berasal dari sektor Jasa khususnya jasa perdagangan. Persentase penduduk yang menekuni mata pencaharian ini mencapai 78,61%. Kemudian disusul mata pencaharian di sektor manufaktur (19,35%) dan sektor pertanian 2,05%. Struktur penduduk menurut mata pencaharian di Kota Denpasar sangat berbeda dengan Provinsi Bali. Walaupun sama-sama dominan di sektor jasa, tetapi peran sektor pertanian masih cukup dominan.

2.2.6 Mobilitas Penduduk

Sebanyak 80 persen migran masuk ke Provinsi Bali menuju daerah perkotaan. Kota tujuan utama para migran tersebut adalah Kota Denpasar. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2012 jumlah migran masuk ke Kota Denpasar sebanyak 12.736 orang, sedangkan migran ke luar sebanyak 11.327 orang. Kedepan pola persebaran

migran masuk Bali ini akan berubah sejalan dengan perkembangan Badung, Gianyar serta Tabanan. Munculnya simpul – simpul ekonomi baru di Badung dan Gianyar menyebabkan tekanan migran masuk ke Denpasar sedikit mereda tetapi tetap harus diwaspadai dampak dari proses migran tersebut.

Tabel 2.2.2
Mobilitas Penduduk Kota Denpasar Tahun 2012

No.	Kecamatan	Datang	Pindah
1	Denpasar Utara	2.599	2.460
2	Denpasar Timur	2.801	2.190
3	Denpasar Selatan	3.741	2.838
4	Denpasar Barat	3.595	3.839
	Total	12.736	11.327

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2012

Tabel 2.2.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2012

No.	Kecamatan	Kelompok Umur												Jumlah	
		16-18	15-1819	7.241	7.184	50.806	49.710	4.088	4.000	8.271	8.093	86.574	84.706		
1	Denpasar Utara	16.168	15.819	7.241	7.184	50.806	49.710	4.088	4.000	8.271	8.093	86.574	84.706		
2	Denpasar Timur	12.035	11.656	5.257	5.092	38.490	37.278	3.035	2.939	6.402	6.200	65.219	63.165		
3	Denpasar Selatan	18.209	17.762	7.910	7.715	55.118	53.763	4.236	4.131	7.990	7.794	93.463	91.165		
4	Denpasar Barat	19.042	18.693	8.391	8.238	58.416	57.346	4.596	4.512	8.767	8.607	99.212	97.396		
	Total	65.454	63.930	28.797	28.129	202.829	198.098	15.954	15.583	31.430	30.694	344.467	336.433		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2012

2.2.7 Proyeksi Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kota Denpasar 2006-2030 dilakukan dengan mengambil asumsi pertumbuhan berdasarkan pertumbuhan data histories periode tertentu sebelumnya yang dikoreksi dengan memperhatikan perubahan komponen demografi sesuai dengan estimasi asumsi parameter demografi yang telah digunakan untuk proyeksi penduduk Provinsi Bali 2000-2025 (Bappenas, BKKBN dan UNDP, 2005)Proyeksi penduduk dibuat dalam tiga skenario.

1. **Pertama**, asumsi pertumbuhan penduduk relatif tinggi (3,2 persen setahun), memakai asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan penduduk periode 1990-2000, namun dengan perkiraan terjadi penurunan laju secara bertahap (**Tabel 2.2.4**)

Tabel 2.2.4

Proyeksi Penduduk Kota Denpasar 2006-2030 (ass 3,2%/thn)

Tahun	Kecamatan				Kota Denpasar
2006	140.142	111.635	170.600	170.920	593.296
2007	144.486	114.202	174.523	179.073	612.285
2008	148.965	116.829	178.537	187.614	631.946
2009	153.583	119.516	182.644	196.564	652.307
2010	158.344	122.265	186.845	205.940	673.393
2011	163.253	125.077	191.142	215.763	695.235
2012	168.314	127.954	195.538	226.055	717.861
2013	173.531	130.897	200.036	236.838	741.302
2014	178.911	133.908	204.636	248.135	765.590
2015	184.457	136.987	209.343	259.971	790.758
2016	188.146	139.042	212.483	267.770	807.442
2017	193.791	143.213	218.858	275.803	831.665
2018	199.604	147.510	225.423	284.077	856.615
2019	205.593	151.935	232.186	292.599	882.313
2020	211.760	156.493	239.152	301.377	908.783
2021	215.996	159.623	243.935	307.405	926.958
2022	220.315	162.816	248.813	313.553	945.498
2023	224.722	166.072	253.790	319.824	964.408
2024	229.216	169.393	258.866	326.221	983.696
2025	233.801	172.781	264.043	332.745	1.003.370
2026	238.477	176.237	269.324	339.400	1.023.437
2027	243.246	179.762	274.710	346.188	1.043.906
2028	248.111	183.357	280.204	353.112	1.064.784
2029	253.073	187.024	285.808	360.174	1.086.080
2030	258.135	190.764	291.525	367.377	1.107.801

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Denpasar

2. **Kedua**, asumsi pertumbuhan penduduk moderat dipilih sebesar 1,94 persen dengan mengambil pendekatan sejarah pertumbuhan penduduk Kota Denpasar periode 2000-2005, dengan perkiraan terjadi penurunan laju secara bertahap (**Tabel 2.2.5**)

Tabel 2.2.5

Proyeksi Penduduk Kota Denpasar 2006-2030 (ass 1,94%/thn)

Tahun	Kecamatan				Kota Denpasar
2006	139.353	111.024	169.749	165.977	586.103
2007	142.865	112.956	172.788	168.865	597.473
2008	146.465	114.921	175.880	171.803	609.070
2009	150.156	116.921	179.029	174.792	620.898

2010	153.940	118.955	182.233	177.834	632.962
2011	157.819	121.025	185.495	180.928	645.268
2012	161.796	123.131	188.816	184.076	657.819
2013	165.874	125.273	192.196	187.279	670.621
2014	170.054	127.453	195.636	190.538	683.680
2015	174.339	129.671	199.138	193.853	697.000
2016	177.826	131.616	202.125	196.761	708.327
2017	180.493	133.590	205.157	199.712	718.952
2018	183.201	135.594	208.234	202.708	729.736
2019	185.949	137.628	211.357	205.748	740.682
2020	188.738	139.692	214.528	208.835	751.793
2021	190.625	141.089	216.673	210.923	759.311
2022	192.532	142.500	218.840	213.032	766.904
2023	194.457	143.925	221.028	215.163	774.573
2024	196.401	145.364	223.239	217.314	782.318
2025	198.365	146.818	225.471	219.487	790.142
2026	200.349	148.286	227.726	221.682	798.043
2027	202.353	149.769	230.003	223.899	806.023
2028	204.376	151.267	232.303	226.138	814.084
2029	206.420	152.779	234.626	228.399	822.224
2030	208.484	154.307	236.972	230.683	830.447

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Denpasar

3. **Ketiga**, asumsi rata-rata pertumbuhan penduduk 1,4 persen setahun yang mana peran pertumbuhan alamiah sebesar 1,03 persen dan pertumbuhan sosial 0,37 persen. Dengan asumsi ini pertumbuhan penduduk karena migrasi diperkirakan terkoreksi tajam menjadi 26 persen terhadap pertumbuhan penduduk. Hasil proyeksi penduduk dengan skenario pertumbuhan penduduk 1,4 persen setahun tersebut ditunjukkan pada **Tabel 2.2.6**.

Tabel 2.2.6
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar 2006-2030 (ass 1,4%/thn)

Tahun	Kecamatan				Kota Denpasar
2006	138.402	110.489	168.899	165.177	582.967
2007	140.921	111.870	171.060	167.242	591.093
2008	143.486	113.269	173.250	169.332	599.337
2009	146.097	114.684	175.468	171.449	607.698
2010	148.756	116.118	177.714	173.592	616.180
2011	151.463	117.569	179.988	175.762	624.783
2012	154.220	119.039	182.292	177.959	633.510
2013	157.027	120.527	184.626	180.184	642.363
2014	159.885	122.034	186.989	182.436	651.343
2015	162.795	123.559	189.382	184.716	660.452
2016	165.236	125.412	192.223	186.564	669.435
2017	167.715	127.294	195.106	188.429	678.544
2018	170.231	129.203	198.033	190.313	687.780
2019	172.784	131.141	201.003	192.217	697.145
2020	175.376	133.108	204.018	194.139	706.641
2021	177.130	134.469	206.059	196.080	713.708
2022	178.901	135.784	208.119	198.041	720.845
2023	180.690	137.142	210.200	200.021	728.053
2024	182.497	138.513	212.302	202.022	735.334
2025	184.322	139.898	214.425	204.042	742.687
2026	186.165	141.297	216.570	206.082	750.114
2027	188.027	142.710	218.735	208.143	757.615

2028	189.907	144.137	220.923	210.224	765.191
2029	191.806	145.578	223.132	212.327	772.843
2030	193.724	147.034	225.363	214.450	780.572

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Denpasar

2.3. KONDISI EKONOMI

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja makro perekonomian daerah yang mampu menggambarkan pendapatan per kapita, struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. PDRB merupakan suatu pendekatan yang baik untuk pengukuran kinerja ekonomi suatu daerah, merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi/usaha dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu (PDRB menurut lapangan usaha) atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan akhir (PDRB menurut komponen penggunaan). Tujuan dari pembangunan ekonomi pada dasarnya berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pada pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata serta memacu pertumbuhan sektor penggerak utama.

Penghitungan PDRB didasarkan pada dua harga, yaitu harga berlaku (*current price*) dan harga dasar/konstan (*constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah dari barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun dasar). Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki daerah tersebut.

Sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi Kota Denpasar masih bertumpu pada industri pariwisata yang menyebabkan kontribusi ekonomi Kota Denpasar masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (sektor tersier) disusul sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi (sektor sekunder). Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 38,13% terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 kontribusi sektor ini diperkirakan mencapai 38,20%. Kondisi yang berlawanan terjadi di sektor pertanian, dimana kontribusi ini selama kurun waktu 2012 hingga 2013 terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian sebesar 6,64% namun pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian diperkirakan menurun menjadi 6,35%.

Tabel 2.3.1

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar

No.	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	6,08	6,94	5,60	6,64	5,23	6,35	6,74	6,59
2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	12,59	12,14	13,31	12,30	14,08	12,49	10,76	12,10
4	Listrik, Gas & Air Bersih	4,31	3,86	4,23	3,76	4,14	3,66	4,16	3,11
5	Konstruksi	4,10	3,13	4,28	3,14	4,46	3,16	3,76	3,19
6	Perdagangan,	34,32	38,05	33,58	38,13	32,79	38,20	39,49	40,41

	Hotel & Restoran								
7	Pengangkutan & Komunikasi	13,20	12,63	13,21	12,76	13,20	12,89	11,00	12,43
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	14,76	12,82	15,00	12,76	15,20	12,69	13,87	12,74
9	Jasa-jasa	10,62	10,43	10,77	10,50	10,90	10,56	9,23	9,88
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan.

Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengkonsumsi semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan.

Tabel 2.3.2
PDRB Per Kapita Kota Denpasar Tahun 2009 – 2013

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Perkapita (Rp/Juta)	Pertumbuhan (%)	Perkapita (Rp/Juta)	Pertumbuhan (%)
2009	10.755.112,28	14,36	5.358.246,42	6,53
2010	12.497.412,51	16,20	5.710.412,32	6,57
2011	13.856.496,18	10,87	6.097.167,27	6,77
2012	15.5557.924,87	12,28	6.535.171,36	6,18
2013	17.777.752,59	14,27	6.988.712,25	6,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

2.3.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar digambarkan oleh perkembangan PDRB, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Tabel 2.3.3**Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar**

No.	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	-14,70	-2,62	-7,82	-4,38	-6,63	-4,34	-3,17	-2,34
2	Pertambangan & Penggalian	11,17	-2,40	-2,77	-2,70	-4,09	0,44	-0,90	-0,83
3	Industri Pengolahan	1,52	-2,10	5,72	1,33	5,78	1,50	6,01	2,97
4	Listrik, Gas & Air Bersih	12,63	0,89	-1,90	-2,66	-2,19	-2,79	3,42	3,07
5	Konstruksi	30,47	-0,62	4,34	0,50	4,14	0,42	0,08	0,02
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	-8,91	0,98	-2,17	0,20	-2,36	0,20	2,76	1,86
7	Pengangkutan & Komunikasi	4,12	-0,40	0,08	1,05	-0,12	1,03	1,17	1,04
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	15,69	0,4	1,62	-0,42	1,33	-0,57	2,05	2,00
9	Jasa-jasa	2,41	0,53	1,46	0,71	1,18	0,58	1,11	0,40
	PDRB	54,39	-5,28	-1,45	-6,36	-2,97	-3,54	2,01	0,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

2.3.4 Laju Inflasi Harga

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak hanya melihat dari besaran PDRB yang dicapai baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, namun harus dilihat juga dari peran harga yang merupakan sisi lain yang harus tetap dijaga karena tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Tingkat harga dalam definisi inflasi secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP).

Laju inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat disuatu wilayah dengan menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau.

Tabel 2.3.4**Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2011 s/d 2014 Kota Denpasar**

Uraian	2011	2012	2013	2014
Inflasi	3,75	4,71	6,85	4,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2010 di Kota Denpasar relatif cukup tinggi dan berada di atas kisaran ideal tingkat inflasi yaitu 5% sampai 7%. Kenaikan ini sebagian besar disumbang oleh komoditas bahan makanan dan pangan. Dilihat dari

inflasi tahun 2011 Denpasar mempunyai inflasi sebesar 3,75% jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya 8,10% dan juga sedikit lebih rendah dari angka inflasi nasional yang mencapai 3,79%. Capaian inflasi Kota Denpasar ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

2.3.5 Identifikasi Kegiatan Perekonomian Perkotaan

Laju pertumbuhan kegiatan ekonomi mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk pada suatu daerah, selama kurun waktu 2001 – 2005. Di Kota Denpasar pertumbuhan sektor jasa merupakan pertumbuhan yang paling tinggi sebesar 34,62 persen dibandingkan dengan sektor lainnya, ini mencerminkan bahwa di Kota Denpasar di masa mendatang sektor jasa merupakan sektor mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja, hal ini merupakan ciri dari kota metropolitan di mana sektor jasa merupakan sektor yang paling dominan akan berkembang, hal yang sama juga terjadi pada sektor listrik, Gas dan Air minum, Pertanian Bangunan / Kontruksi dan Perdagangan hotel dan restoran dengan tingkat pertumbuhan antara 21,82 – 29,74 persen, sehingga sektor ini secara total memiliki keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif dan mempunyai prospek yang cerah untuk berkembang.

Variasi Kegiatan yang berkembang di Kota Denpasar adalah :

1. Kegiatan Pemerintahan (daerah, Perwakilan Nasional, dan Perwakilan Negara Sahabat)
2. Perdagangan dan jasa skala regional, nasional dan internasional
3. Jasa Pariwisata beserta kegiatan turunannya seperti : akomodasi wisata, rumah makan dan restaurant, transportasi wisata, obyek wisata, kesenian dan lainnya
4. Indutri Kecil terkait barang kerajinan, furniture dan benda seni
5. Kegiatan properti perumahan, villa, dan lainnya
6. Kegiatan Pendidikan Tinggi dan keterampilan
7. Pelayanan/bisnis kesehatan regional, nasional dan internasional
8. Pertanian tanaman pangan berupa persawahan dan tanaman hias
9. Wisata Bahari berupa aktivitas di perairan
10. Sektor Informal

2.3.6 Perekonomian Sektor Informal Kota

Sektor Informal di Kota Denpasar berkembang dengan pesat searah dengan peningkatan jumlah migrasi ke daerah urban, Kota Denpasar. Sektor informal ini muncul karena perkembangan struktur perekonomian kota yang memihak pada tenaga terampil dan berpendidikan yang memadai dengan pasar tenaga kerja di daerah perkotaan. Ketidak sesuaian tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh migran dengan kebutuhan pasar ini, memaksa mereka untuk menciptakan pekerjaan sendiri. Lapangan pekerjaan seperti tukang sepatu, pedagang bakso dan makanan lainnya merupakan salah satu contoh wujud dari sektor informal kota termasuk sektor informal yang berada di Kota Denpasar.

2.4 KONDISI SOSIAL BUDAYA

Penduduk Kota Denpasar terdiri dari pemeluk Agama Hindu 426.928 orang, Agama Islam 135.854 orang, Agama Kristen Katolik 13.914 orang, Kristen Protestan 19.215 orang dan yang beragama Budha 9.153 orang. Sampai saat ini di wilayah Kota Denpasar terdapat tempat peribadatan yang terdiri dari 7 buah Pura Dang Kayangan, 105 Pura Kayangan Tiga, 39 Masjid, 38 Gereja Kristen Protestan, 3 buah Gerja Katolik dan 8 buah Vihara.

Dalam hal seni budaya sebagai sebuah keahlian dalam mewujudkan ide atau gagasan yang memiliki nilai estetika. Di dalam proses tersebut, terdapat kemampuan serta

imajinasi pandangan tentang benda, suasana atau karya yang bisa memunculkan rasa indah. Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui pesta kesenian tingkat Kota maupun Provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya diarahkan untuk dapat menunjang aktivitas hiburan dan pariwisata.

Dengan adanya misi untuk menjadikan *Denpasar sebagai Kota Budaya* maka target kunjungan wisata menjadi semakin penting. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Denpasar sebagai tujuan utama diantaranya *city tour*, pengembangan obyek alternatif, variasi acara-acara pagelaran yang bisa menarik minat wisatawan dan meningkatkan kualitas objek wisata yang sudah ada. Sampai tahun ini di Kota Denpasar sudah terdapat 30 grup kesenian dan jumlah gedung kesenian sebanyak 48 buah.

2.5 KONDISI PENGGUNAAN LAHAN

Ruang wilayah Kota Denpasar, dengan luas 12.778 Ha, terdiri dari penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya dan kawasan lindung atau ruang terbuka. Data luas penggunaan lahan didapatkan dari deliniasi peta dasar dengan sumber dari Citra Satelit Ikonos 2002 dan *servey* lapangan tahun 2006. Berdasarkan data tersebut, komposisi pola ruang secara umum terdiri dari :

1. Kawasan terbangun adalah 6969,12 Ha atau 54,54% dari total luas wilayah
2. Kawasan tidak terbangun/terbuka adalah 5808,89 atau 45,46% dari total luas wilayah

**Tabel 2.5.1
Pola Ruang Kota Denpasar**

NO	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	Perumahan	Pdgg & jasa	Pemas mrtahan	Akom. Wisata	Indus tri	Pendi dikan	Kese- ahatan	Han kam	Bgn Umum	Perlaba dan	Rek & Kbran OR	Kbrn & Stra	JENIS PENGGUNAAN LAHAN (HA)				LUAS TOTAL (HA)	% LS PER DS/KEK			
														TPA	DSDP	Sawah	Kebun Omprn			Hutan Bakau	Lahan Ksnng	
I DENPASAR UTARA																						
1	Dangin Puri Kaja	100,45	10,13	2,00	0,90	0,55	1,20	0,60	0,20	0,02	0,10	0,10	0,50	-	-	-	5,00	-	13,76	142,01	1,11	
2	Dangin Puri Kangin	47,50	4,80	1,50	0,50	0,78	4,00	0,80	2,50	0,20	0,10	5,00	-	-	-	-	-	-	7,12	76,00	0,69	
3	Tonja	152,72	7,12	0,20	0,10	1,10	0,90	0,10	0,20	0,20	1,10	0,30	0,50	-	-	-	-	-	16,80	230,00	1,80	
4	Dangin Puri Kauh	51,77	5,07	1,10	0,80	0,10	0,30	0,10	0,16	0,14	0,30	-	-	-	-	-	-	5,60	79,02	0,66		
5	Pemecutan Kaja	250,00	33,75	0,20	0,11	1,90	1,50	0,50	0,20	0,09	0,14	0,70	0,20	0,20	0,50	-	12,00	0,70	84,10	366,00	3,01	
6	Ubung	64,82	1,33	7,80	2,50	2,10	2,80	0,50	-	0,30	0,52	-	-	-	-	-	-	10,50	103,00	0,81		
7	Ubung Kaja	141,01	9,09	0,20	-	1,40	2,20	-	0,60	0,30	0,10	1,72	0,20	-	-	-	140,86	74,57	12,26	400,00	3,13	
8	Dauh Puri Kaja	77,42	7,76	3,70	1,05	0,10	4,00	0,80	-	0,02	0,90	-	-	-	-	-	292,19	156,15	4,00	109,00	0,86	
9	Peguyangan	140,70	12,01	0,20	-	0,20	1,00	0,88	-	0,02	1,60	1,20	-	-	-	-	189,00	145,04	-	644,00	5,04	
10	Peguyangan Kaja	186,72	1,27	0,20	-	0,25	1,80	0,30	-	0,14	1,60	0,40	-	-	-	-	156,95	20,30	-	636,00	4,19	
11	Peguyangan Kangin	168,95	1,13	0,20	-	0,55	0,40	0,33	-	0,19	3,20	0,80	-	-	-	-	-	63,00	-	-	416,00	3,26
II DENPASAR BARAT																						
1	Pd. Sambian Klod	201,11	1,82	0,20	-	1,12	1,20	0,10	-	0,20	0,80	-	0,70	-	-	-	73,00	116,79	-	412,00	3,22	
2	Pemecutan Klod	208,54	27,05	0,20	1,30	4,70	2,70	0,70	-	0,16	2,10	1,30	2,10	-	-	-	121,77	65,80	-	460,00	3,62	
3	Dauh Puri Kauh	84,32	38,55	0,90	0,50	1,00	2,70	1,00	-	-	0,85	-	-	-	-	-	20,82	39,56	-	190,00	1,49	
4	Dauh Puri Klod	133,15	24,57	2,40	2,80	-	2,10	10,00	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	10,08	-	188,00	1,47	
5	Dauh Puri	27,64	15,91	1,20	1,70	0,80	-	5,00	1,70	-	0,10	-	-	-	-	-	-	5,95	-	80,00	0,47	
6	Dauh Puri Kangin	47,50	5,80	0,20	0,80	-	0,50	0,47	-	0,03	0,10	-	-	-	-	-	-	3,60	-	89,00	0,46	
7	Pemecutan	137,90	18,50	0,30	0,11	1,50	1,00	1,00	-	0,25	1,40	2,26	4,00	-	-	-	-	17,28	-	186,00	1,46	
8	Tegal Harum	40,09	0,40	0,10	-	-	3,00	0,10	-	0,13	0,40	-	-	-	-	-	-	5,78	-	60,00	0,39	
9	Tegal Kertha	26,55	0,40	0,35	-	0,50	0,80	0,20	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	2,20	-	36,00	0,27	
10	Padang Sambian	247,20	4,87	12,00	2,10	4,00	4,10	0,30	3,00	-	0,13	0,20	-	-	-	-	2,00	41,48	-	374,00	2,93	
11	Pd. Sambian Kaja	155,00	0,64	2,05	-	1,70	1,80	0,20	-	-	0,50	-	-	-	-	-	33,00	152,48	-	409,00	3,20	
III DENPASAR TIMUR																						
1	Dangin Puri Klod	107,00	2,42	12,20	-	0,14	1,20	0,80	-	-	1,20	-	0,90	-	-	-	-	11,20	-	4,94	142,00	1,11
2	Sumerta Klod	150,32	0,40	24,50	0,60	0,50	3,00	0,30	-	0,13	0,50	14,20	-	-	-	-	-	8,40	-	13,15	271,00	2,12
3	Kesiman	84,79	0,40	0,60	0,10	0,25	0,70	-	-	0,23	0,60	-	-	-	-	-	-	7,00	-	266,00	2,08	
4	Kesiman Pelian	88,19	0,50	0,20	0,60	0,95	0,90	0,90	-	0,16	2,70	9,42	2,50	-	-	-	-	33,60	-	280,00	2,27	
5	Kesiman Kertalangu	125,20	0,40	3,50	1,50	0,50	1,00	0,80	6,00	0,15	1,30	2,81	0,50	-	-	-	-	42,00	-	406,00	3,17	
6	Sumerta	36,63	0,40	0,20	-	0,70	0,30	-	-	0,20	0,80	2,37	0,50	-	-	-	-	8,40	-	62,00	0,41	
7	Sumerta Kaja	47,04	0,40	0,30	0,60	0,30	2,00	-	-	0,21	1,60	2,37	0,50	-	-	-	-	6,75	-	73,00	0,57	
8	Sumerta Kauh	74,50	1,40	1,00	-	-	1,00	-	2,80	0,07	1,75	-	-	-	-	-	-	3,50	-	89,00	0,70	
9	Dangin Puri	52,50	1,50	1,60	0,20	0,15	1,20	-	-	0,03	0,70	0,60	0,50	-	-	-	-	6,02	-	86,00	0,61	
10	Penatih	63,12	1,24	0,40	0,20	3,10	9,00	0,30	-	0,45	2,83	0,71	0,60	-	-	-	-	7,50	-	281,00	2,20	
11	Penatih Dangin Puri	55,04	0,50	0,45	-	0,65	0,50	-	-	0,32	2,24	-	0,90	-	-	-	-	15,40	-	320,00	2,60	
IV DENPASAR SELATAN																						
1	Pemogan	233,17	3,06	1,50	-	5,50	1,70	0,10	24,50	0,22	1,60	-	3,10	-	-	-	231,32	133,90	-	971,00	7,60	
2	Pedungan	271,71	3,43	0,60	0,38	6,50	4,00	-	-	0,16	2,85	0,07	2,00	22,00	-	-	84,00	92,10	-	749,00	6,86	
3	Sesetan	344,02	20,73	6,50	-	4,50	6,50	1,00	1,82	0,02	1,23	1,51	0,70	-	-	-	16,00	278,87	-	739,00	5,78	
4	Serangan	18,63	0,60	0,50	-	-	1,00	0,10	-	0,04	1,50	1,00	0,80	-	-	-	-	19,03	-	400,05	3,76	
5	Sidakarya	126,68	7,23	0,20	6,70	0,90	6,50	0,20	-	0,03	0,20	-	1,60	-	-	-	-	30,00	-	389,00	3,04	
6	Penjler	198,02	1,23	0,50	-	0,50	3,00	0,20	-	0,06	0,06	-	0,80	-	-	-	-	21,00	-	48,63	2,81	
7	Renon	119,00	1,05	1,60	-	1,20	2,50	0,20	-	0,04	0,40	-	1,00	-	-	-	-	24,92	-	5,00	369,00	2,81
8	Sanur Kauh	62,90	3,82	1,00	44,44	2,90	1,20	0,50	-	0,17	0,90	1,00	0,70	-	-	-	176,00	36,77	-	264,00	1,99	
9	Sanur	99,99	50,20	2,80	113,60	5,20	2,30	2,30	-	0,11	2,00	-	1,00	-	-	-	-	105,70	-	15,89	386,00	3,02
10	Sanur Kaja	87,31	11,47	0,20	26,00	1,60	0,50	0,25	-	0,14	0,50	3,30	0,80	-	-	-	-	36,40	-	289,00	2,11	
KOTA DENPASAR																						
		5.164,80	344,46	97,76	210,09	60,39	89,70	31,93	42,48	4,94	44,36	47,27	29,70	22,00	10,00	40,00	2.635,64	1.966,41	626,96	12.778,01	100,00	
% LUAS PER KEGIATAN		40,34	2,70	0,76	1,64	0,47	0,70	0,26	0,33	0,04	0,36	0,37	0,23	0,17	0,08	0,31	19,84	16,39	4,41	100,00	-	
KAW. TERBANGUN		5.164,80	344,46	97,76	210,09	60,39	89,70	31,93	42,48	4,94	44,36	47,27	29,70	22,00	10,00	40,00	2.635,64	1.966,41	626,96	12.778,01	100,00	
KAW. NON TERBANGUN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.969,12	54,54%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.808,89	46,46%	

Sumber : Hasil perhitungan Tim Penyusun berdasarkan Citra Satelit Ikonos dan Survei Lapangan, 2006

Sedangkan untuk rencana pola ruang (penggunaan lahan) hingga tahun 2031 direncanakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Tabel 2.5.2**.

Tabel 2.5.2
Rencana Pola Ruang Kota Denpasar Tahun 2030

NO	FUNGSI RUANG	KECAMATAN (Ha)				DENPASAR (Ha)	% LUAS
		Dps Utara	Dps Timur	Dps Barat	Dps Selatan		
I KAWASAN LINDUNG							
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588.99	588.99	4.61
2	Sempadan Pantai	-	16.00	-	152.50	168.50	1.32
3	Sempadan Sungai	46.11	64.21	45.87	52.34	208.53	1.63
4	RTHK Hutan Kota	2.47	9.51	7.13	25.96	45.08	0.35
	SUB TOTAL I	48.57	89.72	53.00	819.79	1,011.09	7.91
II KAWASAN BUDIDAYA							
1	Permukiman	1,872.10	850.19	1,456.12	1,726.29	5,904.69	46.21
2	Perdagangan dan Jasa	355.68	208.90	525.86	615.88	1,706.32	13.35
3	Perkantoran Pemerintahan	40.85	92.02	19.38	17.82	170.07	1.33
4	Kawasan Efektif Pariwisata	-	47.16	-	683.70	730.86	5.72
5	Perindustrian dan Pergudangan	-	-	-	32.50	32.50	0.25
6	Fasilitas Pendidikan	18.28	20.26	15.42	23.61	77.57	0.61
7	Fasilitas Kesehatan	8.03	3.30	28.30	10.20	49.83	0.39
8	Pertahanan dan Keamanan	2.65	7.30	4.70	29.82	44.47	0.35
9	Fasilitas Peribadatan	11.10	17.90	9.90	12.19	51.09	0.40
10	Fas.Rekreasi dan Olah Raga	54.05	66.45	40.26	112.71	273.47	2.14
11	Kaw. Bddy T. Pangan (sawah)	473.72	610.28	24.28	455.24	1,563.52	12.24
12	Kuburan dan Setra	3.80	6.40	11.00	14.20	35.40	0.28
13	TPA Suwung	-	-	-	10.00	10.00	0.08
14	IPAL Suwung	-	-	-	19.57	19.57	0.15
15	Estuary Dam	-	-	-	33.03	33.03	0.26
16	Jaringan Jalan	218.61	234.12	222.26	328.87	1,003.86	7.86
17	Pelabuhan	-	-	-	52.00	52.00	0.41
18	Terminal	4.55	-	2.52	1.58	8.66	0.07
	SUB TOTAL II	3,063.42	2,164.28	2,360.00	4,179.21	11,766.91	92.09
III TOTAL I + II							
		3,112.00	2,254.00	2,413.00	4,999.00	12,778.00	100.00
IV RUANG TERBUKA (%)							
		6.29	7.88	2.77	14.30	31.23	
V RUANG TERBANGUN (%)							
		93.71	92.12	97.23	85.70	68.77	

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Denpasar Tahun 2011 - 2031

2.6 PENCAPAIAN DERAJAT KESEHATAN

2.6.1 Akses Terhadap Sarana Kesehatan

1. Puskesmas

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan disuatu wilayah kerja. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1,69. Cakupan kunjungan rawat jalan ke Puskesmas yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2013 sebanyak 47,04% sedangkan

cakupan kunjungan puskesmas untuk rawat inap sebesar 0,18%. Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 15%, sedangkan cakupan kunjungan rawat inap ke puskesmas masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,5%.

Tabel 2.6.1
Kunjungan Pasien ke Puskesmas di Kota Denpasar

	2009	2010	2011	2012	2013
Densel I	174.768	51.483	35.918	35.999	30.468
Densel II	165.281	54.954	56.934	46.107	35.880
Densel III	42.476	35.151	28.518	22.091	10.039
Densel IV	42.476	56.839	48.424	92.108	93.685
Dentim I	36.912	30.953	47.807	38.428	35.685
Dentim II	69.389	38.121	39.839	35.221	34.825
Denbar I	103.271	38.081	36.192	37.485	39.697
Denbar II	93.927	86.129	84.409	57.970	36.373
Denut I	54.102	3.294	38.700	35.364	29.742
Denut II	131.425	3.568	47.101	38.250	38.658
Denut III	85.084	3.147	50.342	39.589	41.780

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

2. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan professional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya dan merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Disamping Balai Pengobatan/Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui rumah sakit, tanpa melepaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Rumah sakit yang ada di Kota Denpasar terdiri dari 5 buah rumah sakit pemerintah (1 buah RS Tipe A, 1 buah RS Tipe B dan 3 buah RS Tipe C) dan 14 buah rumah sakit swasta yang seluruhnya termasuk dalam Rumah Sakit Tipe C, memiliki kemampuan gawat darurat, memiliki kemampuan laboratorium kesehatan dan seluruhnya sudah memiliki 4 (empat) spesialis dasar serta memiliki akses ketersediaan darah untuk ibu hamil dan neonatus resti/komplikasi yang dirujuk kecuali RS Indra Masyarakat.

Tabel 2.6.2
Kondisi Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2014

No.	Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	Kapasitas (TT x 365)	BOR (%)
1	RSUD Wangaya	200	73.000	78.9
2	RSUP Sanglah	703	256.595	87.2
3	RS Trijata/ Bhayangkara	58	21.170	31.0
4	RS Udayana	120	43.800	47.7
5	RS Puri Raharja	101	36.865	68.0
6	RS Harapan Bunda	25	9.125	38.8
7	RS Dharma Usadha	32	11.680	34.0
8	RS Dharma Yadnya	50	18.250	29.3

9	RS Surya Husada	100	36.500	84.0
10	RS Prima Medika	114	41.610	82.7
11	RS Manuaba	40	14.600	61.5
12	RS Kasih Ibu	95	34.675	59.0
13	RS Indera	25	9.125	2.4
14	RS Balimed	120	43.800	64.2
15	RS Bali Royal	100	36.500	70.5
16	RS Surya Ubung	48	17.520	45.0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

2.6.2 Akses Terhadap Sarana Kesehatan Lainnya

Disamping Puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan rumah sakit masih banyak terdapat sarana kesehatan lainnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6.3

Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010-2013

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Posyandu	456	456	459	485
2	Jumlah Balita	20.337	18.548	18.706	18.321

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Tabel 2.6.4

Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Denpasar Selatan	125	4.421	28.27/1000 balita
2	Denpasar Timur	102	3.622	28.16/1000 balita
3	Denpasar Barat	125	5.790	21.58/1000 balita
4	Denpasar Utara	133	4.488	29.63/1000 balita
	Jumlah	485	18.321	26.47/1000 balita

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Tabel 2.6.5

Data Ijin Sarana Kesehatan yang Dikeluarkan Selama Tahun 2013

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Desa Siaga	43
2	Gudang Farmasi	1
3	Ijin dokter umum praktek swasta	248
4	Ijin dokter spesialis praktek swasta	270
5	Ijin dokter gigi praktek swasta	128
6	Bidan praktek swasta	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

2.6.3 Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain :

1. Angka Kematian Netto (*Net Death Rate/NDR*)

Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2013 :

- a. RSUP Sanglah Denpasar : 3.8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- b. RS Darmayadnya : 48 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- c. RS Puri Raharja : 1.2 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- d. RS Surya Husada : 0.9 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- e. RS Bali Med : 0.8 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

2. Angka Kematian Umum (*Gross Death Rate/GDR*)

Angka Kematian Umum (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar hidup dan mati. Lima besar Angka GDR tertinggi di beberapa rumah sakit (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2013 adalah :

- a. RSUP Sanglah : 7.1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- b. RSUD Wangaya : 3.3 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- c. RS Kasih Ibu : 1.7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- d. RS Surya Husada : 1.6 per 1000 pasien keluar hidup dan mati
- e. RS Darma Yadnya : 1.5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

3. Angka Penggunaan Tempat Tidur (*Bed Occupation Rate/BOR*)

BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar pada tahun 2013 adalah :

- a. RSUP Sanglah : 87.2
- b. RS Surya Husada : 84.0
- c. RSUD Wangaya : 78.9
- d. RS Prima Medika : 82.7
- e. RS Bali Royal : 70.5

4. Rata-rata Lama Dirawat (*Length Of Stay/LOS*)

Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit (pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2013 adalah 3-4 hari.

2.6.4 Indikator Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan dalam dasa warsa terakhir, di Kota Denpasar secara umum telah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, meningkatkan umur harapan hidup, peningkatan jumlah bayi, balita tertimbang, peningkatan bayi balita yang menunjukkan kenaikan berat badannya, penurunan angka bagi balita yang dibawah garis merah, penurunan angka balita gizi buruk.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sensitif terhadap kesediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan prenatal. Disamping itu AKB juga mempunyai asosiasi dengan angka GNP per kapita, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka kematian bayi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia dari sisi kesehatan masyarakatnya, beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Angka kematian bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.6.6
Angka Kematian Bayi

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi (AKB)		
		Denpasar	Bali	Nasional
1	2009	11.3/1000 KH	7.18	32
2	2010	3.8/1000/KH	8.89	32
3	2011	1.8/1000 KH	7.22	32
4	2012	0.7/1000 KH	6.37	32
5	2013	0.5/ 1000 KH	5.49	32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Dalam tiga tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan kematian bayi di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya, meningkatnya pendapatan masyarakat serta perbaikan gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit.

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar sudah dibawah target dan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.

2. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.

Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil (bumil), pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan.

Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu tujuan ke-5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu Angka Kematian Ibu Maternal.

Secara umum derajat kesehatan masyarakat di Kota Denpasar telah menunjukkan perbaikan seperti dilihat dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian juga ditentukan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu lahir.

Angka Kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.6.7

Angka Kematian Ibu Maternal

No.	Tahun	Angka Kematian Ibu Maternal
1	2009	25.36/100.000 KH
2	2010	24.91/100.000 KH
3	2011	39.46/100.000 KH
4	2012	59.7/100.000 KH
5	2013	21.8/100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun terakhir angka kematian ibu di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan namun dapat ditekan pada tahun 2013. Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2013 (21.8 per 100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2013 (95 per 100.000 KH). Selama tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi 4 kematian ibu yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 3 orang ibu nifas. Bila kita lihat seluruh ibu hamil meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Lima puluh persen kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit Non Obstertri seperti HIV/AIDS, jantung, ginjal dan penyakit penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama-sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat ditekan. Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi di 4 kecamatan seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Tabel 2.6.8

Angka Kematian Ibu

No.	Uraian	Angka Kematian Ibu (AKI)			
		2010	2011	2012	2013
1	Denpasar Barat	8.3/100.000 KH	19.44/100.000 KH	50.55/100.000 KH	32/100.000 KH
2	Denpasar Timur	-	33.20/100.000 KH	60.33/100.000 KH	-

3	Denpasar Selatan	16.6/100.000 KH	27.85/100.000 KH	53.01/100.000 KH	-
4	Denpasar Utara	-	86.73/100.000 KH	78.74/100.000 KH	46/100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Data di atas menunjukkan bahwa kematian maternal tertinggi di kecamatan Denpasar Selatan. Bila dilihat kelompok umurnya kematian ibu hamil tertinggi pada kelompok umur 20-34 tahun.

Secara umum Angka Kematian Ibu di Kota Denpasar pada tahun 2013 masih dibawah target Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), dan bila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar (95 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Kota Denpasar sudah cukup baik. Disamping itu pula akses terhadap sarana pelayanan sangat mudah karena penyebarannya hampir merata di wilayah seluruh Kota Denpasar.

2.6.5 Angka Kesakitan

1. HIV/AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan Puskesmas II Denpasar Barat.

Penyebaran HIV/AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah berikut ini.



Gambar 2.6.1

Grafik Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar 2008 s/d 2013

Data pada grafik 2.6.1 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada tahun 2011 tercatat kasus baru HIV-AIDS sebanyak 221 kasus HIV dan 221 kasus AIDS. Pada tahun 2012 ditemukan 294 kasus HIV dan 310 kasus AIDS. Pada tahun 2013 jumlah penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 274 orang (128 penderita laki-laki dan 98 perempuan) dan AIDS sebanyak 326 orang (228 penderita laki-laki dan 98 penderita perempuan).

Selama tahun 2013 ditemukan 9 kematian akibat AIDS (5 laki-laki dan 4 perempuan). Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV+. Situasi kasus HIV/AIDS menurut kelompok resiko di Kota Denpasar sebagian besar terdapat pada kelompok heterosex (57,53%) kemudian disusul IDU (30,97%), Homo/Biseksual (6,10%), tidak diketahui (4,12) dan perinatal (1,28%).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah. Pada tahun 2013 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining terhadap 3.586 pendonor darah. Dari jumlah tersebut sebanyak 25 sampel darah (0,70%) positif terinfeksi HIV/AIDS.

Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.

2. Demam Berdarah Dangué (DBD)

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypti. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk aedes aegypti tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Denpasar merupakan daerah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB).

DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Jumlah kasus DBD pada tahun 2013 adalah 1.765 kasus, terdiri dari 950 penderita laki-laki dan 815 perempuan. Kematian akibat DBD pada tahun 2013 sebanyak 4 orang (CFR=1.8%). Incidence rate DBD pada tahun 2013 adalah 249.9 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.6.9

Jumlah Penduduk yang Terjangkit Demam Berdarah Dangué

No.	Tahun	Demam Berdarah Dangué
1	2009	2.190
2	2010	4.431
3	2011	981
4	2012	1.006
5	2013	1.765

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya

pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, menutup dan mengubur) plus menabur larvasida. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan PSN adalah Angka Bebas Jentik (ABJ). Tahun 2012 ABJ Kota Denpasar adalah sebesar 96,36%.

2.6.6 Status Gizi

Keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis (pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lainnya).

Gizi buruk pada balita sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian pada balita. MDGs menetapkan prevalensi bagi Indonesia sebesar 18,5 persen dan pencapaian Indonesia sebesar 5,4 persen berarti target MDGs sudah terpenuhi. Pada tahun 2013 prevalensi gizi buruk di Kota Denpasar adalah sebesar 0.04 persen, pencapaian ini sudah lebih rendah dari pencapaian secara nasional dan target MDGs.

Kejadian gizi buruk dan BBLR dipengaruhi oleh multi faktor seperti keadaan soal ekonomi orangtua, tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua serta adanya penyakit kronis seperti TB, Paru, HIV/AIDS dan lain sebagainya. Dalam lima tahun terakhir kasus gizi buruk di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini.

Tabel 2.6.10
Gizi Buruk

No.	Tahun	Gizi Buruk
1	2009	0,025%
2	2010	0,02%
3	2011	0,01%
4	2012	0,02%
5	2013	0,04%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

2.6.7 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar di Kota Denpasar meliputi Askes, Jamsostek, Askeskin dan jenis jaminan kesehatan prabayar lainnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Denpasar sebanyak 850.600 jiwa. Penduduk yang tercakup dalam Asuransi Kesehatan (Askes) sebanyak 88.279 jiwa (13,%), Jamsostek mencapai 72.779 jiwa (8,55%), Askeskin sebanyak 68.579 jiwa (8,17%), JKMB 415.125 (48,80%).

Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang jumlahnya mencapai 69.579 jiwa, seluruhnya (8,17%) sudah tercakup dalam Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Pelayanan yang berhak didapatkan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit dari 69.579 jiwa masyarakat miskin yang ada, yang memanfaatkannya 23.813 jiwa di puskesmas dan 19.007 jiwa di rumah sakit.

2.6.8 Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat juga dapat dilihat dari nilai Umur Harapan Hidup (UHH). UHH juga merupakan indikator Indeks Keberhasilan Pembangunan Manusia. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari peningkatan UHH. Umur Harapan Hidup penduduk Kota Denpasar tahun 2013 berdasarkan data BPS sebesar 73.06 tahun. Angka ini lebih tinggi dari UHH Propinsi Bali berdasarkan kajian Bali Sehat 2005 oleh BPS sebesar 72,4 tahun untuk semua jenis kelamin dan lebih tinggi dari proyeksi UHH nasional tahun yaitu sebesar 68,7 tahun.

2.7 KELEMBAGAAN

Komponen pelaku (stewardship) sistem kesehatan di Kota Denpasar yang didukung hubungan antar berbagai kelembagaan, kelompok, dan masyarakat dapat dikategorikan mempunyai peranan sebagai berikut.

1. Lembaga penetap kebijakan dan regulator pelayanan kesehatan.

Kebijakan desentralisasi yang diamanatkan pada UU No. 32 dan 33 pada intinya menekankan mengenai perlunya penambahan kekuatan pusat dan provinsi serta kabupaten/kota dalam pelaksanaan desentralisasi. Kenyataan ini menunjukkan Kota Denpasar dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta diperlukan adanya lembaga penetap kebijakan yang berfungsi mengatur bidang kesehatan sebagai penanggung jawab sektor kesehatan.

2. Lembaga dan unit pemerintah non dinas kesehatan yang terkait dengan sektor kesehatan (SKPD lain yang terkait sektor kesehatan)

Keterlibatan lembaga dan unit pemerintah non Dinas Kesehatan dalam sektor kesehatan tidak dapat diabaikan. Berbagai sektor lain yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan kesehatan antara lain : Bappeda, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kimpraswil, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Pendidikan, Dinas Perijinan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Pertanian dan Kehewan, Kantor Linmas dan PK, Bagian Hukum, Kantor Kesmas dan Pengarusutamaan Gender, RSUD Kota Denpasar.

Landasan Pelaksanaan

3.1 KOTA SEHAT

3.1.1 Pengertian Kota Sehat

Secara umum pengertian kota sehat adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya dan produktivitas, serta perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan wilayah perkotaan. Konsep Kota sehat merupakan pola pendekatan untuk mencapai kondisi kota yang aman, nyaman, dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian wilayah yang mendorong inisiatif masyarakat (*capacity building*) menuju hidup sehat.

Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut Forum Kota Sehat atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa. Tatanan dan sasaran Kota Sehat sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kota dikelompokkan dalam 9 tatanan berdasarkan tatanan/ kawasan dan permasalahan khusus sebagai berikut:

1. Tatanan permukiman, sarana dan prasarana sehat
2. Tatanan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi sehat
3. Tatanan industri dan perkantoran yang sehat
4. Tatanan kawasan pariwisata sehat
5. Tatanan pertambangan sehat
6. Tatanan hutan sehat
7. Tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri
8. Tatanan ketahanan pangan dan gizi
9. Tatanan kehidupan sosial yang sehat

Ciri-ciri kota yang sehat diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat. Sedangkan pemerintah sebagai fasilitator.
3. Mengutamakan pendekatan proses daripada target, tidak mempunyai batas waktu, berkembang sesuai sasaran yang diinginkan masyarakat yang dicapai secara bertahap.
4. Penyelenggaraan kegiatan didasarkan kesepakatan dari masyarakat bersama Pemerintah Kota.
5. Pendekatannya juga merupakan masterplan kota.
6. Pemerintah Kota merupakan partner kunci yang melaksanakan kegiatan.
7. Kegiatan tersebut dicapai melalui proses dan komitmen pimpinan daerah, kegiatan inovatif dari berbagai sektor yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan kerjasama.

8. Dalam pelaksanaan kegiatan harus terintegrasi kondisi fisik, ekonomi dan budaya setempat. Beberapa penghargaan yang diberikan untuk Kota Sehat setiap 2 tahun diadakan penilaian dan diberikan penghargaan "SWASTI SABA" dari Presiden yang dikategorikan menjadi 3 yaitu:

1. Penghargaan PADAPA, jika mengikuti penilaian minimal 2 tatanan.
2. Penghargaan WIWERDA, jika mengikuti penilaian 3 – 4 tatanan.
3. Penghargaan WISTARA, jika mengikuti lebih dari 5 tatanan atau lebih dan penghargaan disampaikan langsung oleh Presiden kepada Kepala Daerah.

3.1.2 Aspek-aspek dalam Pembangunan Kota Sehat

1. Cakupan Program

Program merupakan penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Aspek program dalam pembangunan Kota Sehat berfungsi sebagai implementator sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Merealisasi program berarti melaksanakan kegiatan operasional setiap tahunnya sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada satu program yang merupakan tindakan-tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal dan teknologi, dana atau kombinasi dari kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai bahan masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa. Realisasi pembangunan Kota Sehat akan dapat dilihat dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait setiap tahunnya.

Untuk mendukung pembangunan kota sehat, program yang dilaksanakan cakupannya dapat meliputi wilayah kecamatan, atau rata-rata desa/kelurahan yang mengikuti program kota sehat serta tatanan apa saja yang dipilih dalam rangka pembangunan kota sehat secara berkelanjutan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap tatanan merupakan bagian-bagian kecil dari upaya pembangunan kota sehat secara lebih besar.

2. Aktivitas Forum Kota Sehat

Keberhasilan pembangunan kota sehat juga ditentukan oleh adanya forum kota sehat yang dibentuk pada tingkat kota. Aktivitas forum kota sehat sangat ditentukan oleh dukungan dari Pemerintah Kota berupa kebijakan pembentukan forum kota sehat, pendanaan dan sekretariat kota sehat beserta kelengkapannya. Disamping dukungan dari pemerintah, dukungan dari lembaga legislatif daerah dalam hal ini DPRD Kota Denpasar juga sangat menentukan pembangunan kota sehat ini. Dukungannya dapat berupa regulasi terkait dengan pembangunan kota sehat, dana dan program-program yang akan dilaksanakan.

Dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD saja tidaklah cukup untuk membangun kota sehat secara berkesinambungan. Sebagai upaya menggemakan pembangunan kota sehat upaya sosialisasi secara terus menerus harus dilakukan, seperti melalui media massa, pertemuan kelompok atau banjar, LSM, masyarakat yang ikut program sehat dan media tradisional lainnya. Dengan terbentuknya forum kota sehat di tingkat kota ini upaya peningkatan aktivitasnya juga perlu terus diupayakan melalui penyusunan dokumen rencana kerja forum.

3. Aktivitas Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat

Ujung tombak pembangunan kota sehat adalah desa/ kelurahan. Oleh karenanya diperlukan pembentukan forum komunikasi kota sehat di desa/ kelurahan serta pembentukan kelompok kerja desa/ kelurahan. Kelompok kerja yang dibentuk di tingkat desa/ kelurahan ini berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dalam memecahkan masalah-masalah yang ada terkait dengan bidang kesehatan. Oleh

karenanya lembaga ini perlu didukung dengan komitmen dari pimpinan desa/ kelurahan serta semua stakeholder yang ada di tingkat desa/ kelurahan, didukung pula dengan sekretariat dan perlengkapannya serta dana yang memadai sehingga pokja di tingkat desa/ kelurahan ini dapat berfungsi dengan optimal.

4. Aktivitas Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan/ Kawasan Sehat

Sebagaimana telah diuraikan di atas kelompok kerja desa/ kelurahan merupakan ujung tombak dalam melaksanakan program kota sehat ini. Oleh karenanya, kelompok kerja perlu membuat rencana kerja yang jelas dimana rencana kerja ini disosialisasikan dan disepakati dengan masyarakat. Di samping itu pokja juga bertugas mendiskusikan masukan dari masyarakat tentang pelaksanaan program kota sehat di desa/ kelurahan yang bersangkutan. Keberhasilan kelompok kerja ini sangat tergantung dari keaktifan anggota kelompok kerja dan kemampuannya dalam menggalang kemitraan dengan LSM maupun institusi lainnya yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan kesehatan di tingkat desa/ kelurahan.

5. Tim Pembina Kota Sehat

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan kota sehat di Kota Denpasar, di tingkat kota perlu dibentuk tim Pembina kota sehat yang fungsi utamanya adalah memberikan pembinaan, arahan dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan kota sehat. Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik maka tim Pembina tingkat lokal ini perlu didukung dengan sekretariat beserta kelengkapannya, dana dan program kerja yang berkesinambungan.

6. Kebijakan Pemerintah Kota

Pembangunan kota sehat sulit dilaksanakan bila tidak ada komitmen dari pemerintah kota. Komitmen ini tertuang dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dalam pembangunan kota sehat. Secara lebih rinci kebijakan itu dirumuskan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya yang mengagendakan pencapaian program-program dari pembangunan kota sehat, didalamnya termasuk memberikan arahan kebijakan bagi pelaksanaan program-program kota sehat.

Arahan kebijakan ini merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas apa yang telah dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam kebijakan pemerintah ini juga disusun indikator-indikator yang menjadi petunjuk capaian dari suatu kegiatan, baik indikator yang bersifat umum maupun indikator yang bersifat khusus.

3.1.3 Hubungan Kota Sehat dengan Pencapaian Visi dan Misi Kota Denpasar

Denpasar sebagai kota metropolitan dihadapkan pada permasalahan pembangunan yang bersifat multi-dimensional, mulai masalah kependudukan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, kebersihan, kemacetan, pencemaran, ketertiban, kemiskinan, ekonomi, budaya dan berbagai masalah lainnya. Globalisasi yang sudah merambah berbagai belahan dunia juga memberikan berbagai dampak bagi Kota Denpasar. Permasalahan ini mau tidak mau mesti dicarikan solusinya agar masyarakat dapat maju secara ekonomi tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi landasan kehidupannya.

Mewujudkan Denpasar yang berwawasan budaya telah dilakukan dalam periode lima tahun yang lalu. Ke depannya Denpasar diarahkan sebagai kota kreatif yang tetap berwawasan budaya dalam bingkai keseimbangan menuju keharmonisan dalam segala hal.

Visi ini dirumuskan: **“Denpasar Kota Sehat Dan Cerdas 2021”**

Misi yang dilaksanakan selama lima tahun untuk mewujudkan visi ini antara lain:

1. Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan budaya Bali.

Arus globalisasi sulit untuk dihindari, maka setiap komponen masyarakat maupun pemerintah sudah selayaknya mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh agar terhindar dari pengaruh buruk globalisasi, khususnya pengaruh budaya yang tidak sejalan dengan budaya Bali. Kegiatan utama dalam bidang ini adalah meningkatkan upaya pemahaman ajaran agama pada masing-masing orang, memberdayakan lembaga lokal, melestarikan adat dan budaya serta menjalin kemitraan dengan kota-kota lain dalam jaringan Kota Pusaka yang mempunyai komitmen untuk melestarikan peninggalan sebuah kota yang mencerminkan jati diri itu sendiri. Sebagai kota yang menjadi tujuan wisata internasional, Kota Denpasar tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa arah yang jelas. Namun demikian tidak pula membiarkan perkembangan kota yang meniru begitu saja perkembangan kota lain tanpa memadukannya dengan budaya yang eksis di masyarakat. Mewujudkan Denpasar *Clean and Green*, serta mewujudkan Denpasar sebagai Kota Adipura, merupakan langkah nyata dalam menjadikan Denpasar sebagai Kota Sehat yang nyaman untuk dikunjungi.

2. Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif.

Seiring dengan memperkuat jati diri masyarakat kota, maka memberdayakan masyarakat juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan masyarakat kota yang sejahtera dan damai. Mengingat masyarakat yang mandiri akan dengan mudah dapat memberikan kontribusinya dalam pembangunan secara swadaya. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat dari peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan Desa Pekraman dan lembaga-lembaga adat maupun lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan. Kemitraan ini sangat penting dilakukan karena pemerintah tidak mungkin melaksanakan semuanya tanpa bantuan lembaga lainnya. Kemitraan dan hubungan harmonis dengan lembaga-lembaga ini juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencapaian Kota Sehat di Kota Denpasar.

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) melalui penegakan supremasi hukum (*law enforcement*).

Implementasi dari misi ini mendukung misi yang lainnya, mengingat dalam misi ini tersirat keinginan yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari penyimpangan. Pemerintahan yang bersih dari penyimpangan akan memberikan dampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang kesehatan melalui upaya mewujudkan Kota Sehat itu sendiri.

4. Meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat (*welfare society*).

Dilandasi oleh filosofi *sewaka dharma* (melayani adalah kewajiban) adalah merupakan kelanjutan dari pelaksanaan ketiga misi di atas. Meningkatkan pelayanan bidang kependudukan, kesejahteraan sosial, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan akses bidang pendidikan dan kesehatan merupakan gambaran upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Demikian pula membangun Kota Sehat merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat kota agar dapat hidup dalam suasana yang lebih nyaman, aman dan damai secara berkesinambungan.

5. Membangun pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Misi kelima ini bukanlah misi terakhir, tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan pencapaian keempat misi lainnya. Misi yang satu bukanlah menjadi lebih prioritas dari misi yang lainnya, melainkan kelimanya diimplementasikan secara bersama-sama guna memperoleh capaian yang optimal. Pencapaian misi kelima ini lebih dikonkritkan dengan Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis budaya unggulan, yang diharapkan dapat memberikan pijakan yang kuat dalam membangun Kota Sehat di Kota Denpasar.

Penyelenggaraan Kota Sehat sendiri merupakan implementasi dari misi pembangunan yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan publik menuju kesehatan masyarakat (*welfare society*). Sebagai salah satu pelaksanaan dari misi pembangunan maka penyelenggaraan Kota Sehat harus didukung oleh semua komponen pembangunan yang ada guna terciptanya Kota Denpasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat. Penyelenggaraan Kota Sehat juga membawa amanat mewujudkan visi Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali yaitu Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Sedangkan visi Dinas Kesehatan Kota Denpasar yaitu Denpasar Sehat yang Kreatif, Mandiri dan Berkeadilan.

3.2 LANDASAN GLOBAL DAN NASIONAL

3.2.1 MDGs

Adanya tuntutan dan kesepakatan global yang dituangkan dalam *Millennium Development Goals* yang menetapkan tiga tujuan utama bidang kesehatan yaitu:

1. Menurunkan angka kematian anak;
2. Meningkatkan kesehatan ibu;
3. Mengurangi risiko penularan HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

Sementara tetap berperan mendukung kesepakatan global lainnya yaitu menurunkan angka kemiskinan, pendidikan dasar yang universal, kesetaraan gender di semua tingkatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan menjamin keberlanjutan lingkungan.

3.2.2 RPJPN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat pasal-pasal yang berhubungan dengan kewajiban Negara Republik Indonesia untuk melindungi rakyatnya dari bencana. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", yakni memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelayanan kesehatan. Dalam UU RI No.23 Tahun 1992 Bab I, Pasal 3 tentang kesehatan disebutkan, bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang kemudian diterjemahkan, berbagai undang-undang atau pun peraturan telah ditetapkan dalam upaya memberikan perlindungan kepada rakyat dan pelayanan kesehatan seperti Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum Pertahanan dan Keamanan Negara, Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Penyakit Menular, Undang-Undang No. 32 tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

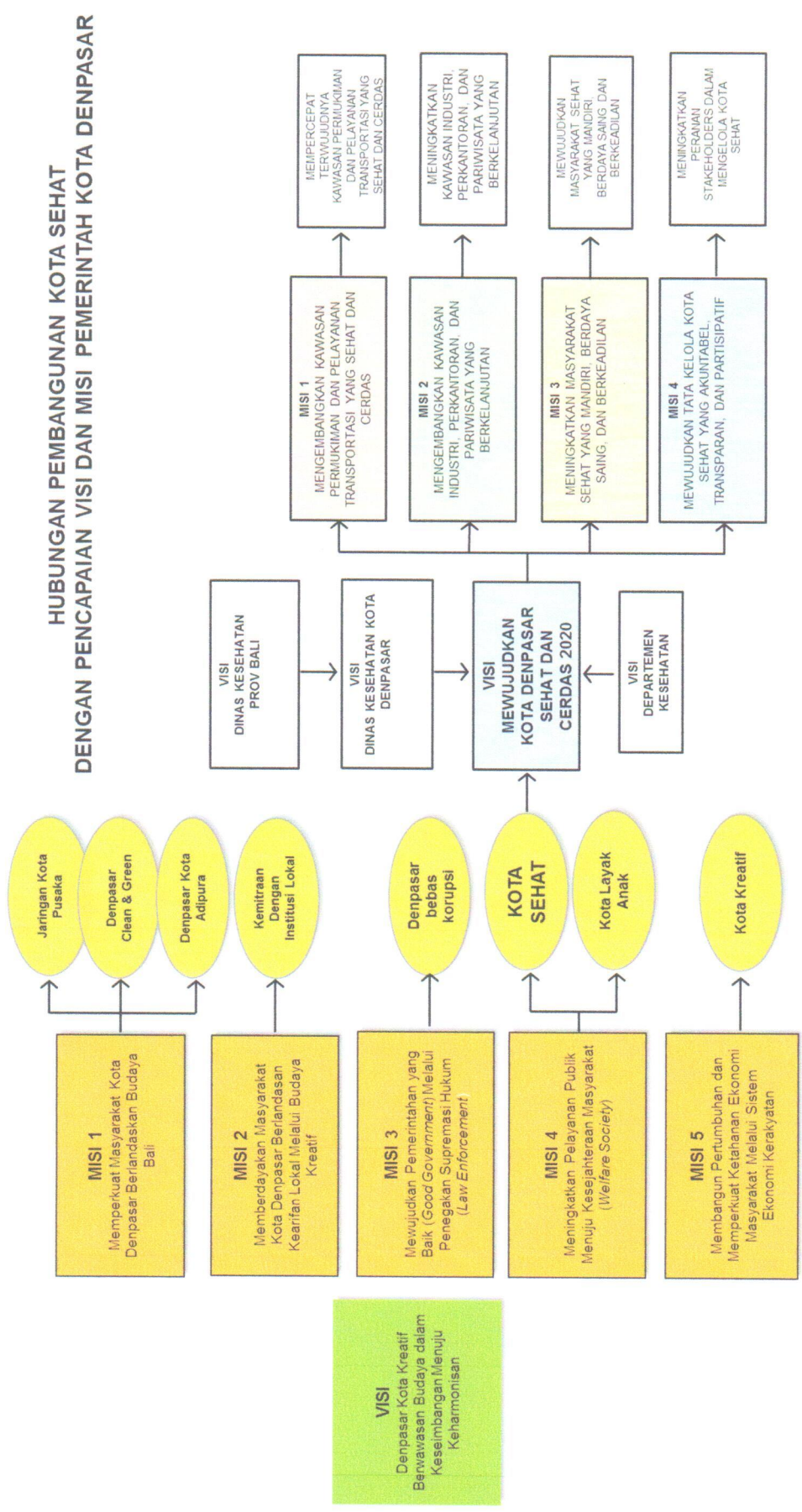
3.2.3 RPJMN 2015 -2019

Rencana strategis Departemen Kesehatan disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam Undang-undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pula pada RPJMN 2015-2019. Renstra Departemen Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat.

3.3 LANDASAN REGIONAL

3.3.1 Kebijakan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan *master plan* kesehatan Provinsi Bali saat ini dinilai dari gambaran angka kesakitan, angka kematian dan usia harapan hidup serta mencakup penyakit menular dan non menular. Sementara perilaku perorangan menjadi faktor determinan penting untuk status kesehatan yang meliputi perilaku masyarakat, cara hidup, perilaku di jalan raya, dan pola perokok masyarakat di Provinsi Bali.



Gambar 3.1.1

Adapun faktor determinan sosial yang meliputi gizi, kemudian lingkungan hidup peternakan dan kemiskinan, sedangkan untuk faktor determinan struktural adanya aturan hukum, kebijakan lingkungan hidup, sistem informasi kesehatan, sistem surveilans kesehatan, Komponen pelaku sistem kesehatan di Provinsi Bali dengan pendekatan berdasarkan konsep *governance*, secara garis besar ada 3 (tiga) kelompok pelaku kegiatan yaitu (i) lembaga pemerintah dan quasi pemerintah; (ii) lembaga usaha kesehatan; (iii) masyarakat dan berbagai kelompok di dalamnya. Hubungan (*interkoneksi*) antar berbagai lembaga, kelompok dan masyarakat dapat dilihat dalam bentuk *stewardship* (kebijakan, regulasi), *healthcare delivery* (pelayanan kesehatan), *financing* (pembiayaan), dan *resource generation* (pengelolaan sumberdaya).

3.3.2 RPJMD 2016 - 2021

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Denpasar tahun 2016-2021 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen stakeholder guna mempertahankan kesinambungan pembangunan. Maka salah satu kebijakan program pembangunan daerah merupakan suatu jembatan konseptual yang menghubungkan antara rumusan tujuan pembangunan. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan selama 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan perencanaan pembangunan kesehatan daerah di Kota Denpasar. Renstra Dinas Kesehatan tersebut diatas dalam proses penyusunannya memperhatikan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

3.4 INDIKATOR

3.4.1 Indikator Tatanan Kota Sehat (Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri (PERBERMENDAGRI) dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 (34/2005) Nomor 1138/Mengkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

INDIKATOR	MDGs	PENCAPAIAN 2014	TARGET NASIONAL	TARGET 2020
MORTALITAS				
1. AKB/1000 lahir hidup	3,03	7,62	≤ 40	3,57
2. AKBalita/1000 lhr hidup	0,17	1,02	≤ 58	0,14
3. AKI/100.000 lahir	68,1	61,79	≤ 150	61,79

hidup				
4. UHH	-	68,32	67,9	69,32
MORBIDITAS				
1. Angka Kesakitan Malaria/ 1000 pddk		0	≤ 5	0
2. Angka Kesembuhan TB Patu BTA+		81,60	≥ 85	85
3. Prevalensi HIV (% kasus thp pddk beresiko)		0,88	≤ 0,9	0,07
4. Angka AFP pd anak usia < 15 th/100.000 anak		1,34	≤ 0,9	1
5. Angka Kesekitan DBD/100.000 pddk			≤ 20	50
STATUS GIZI				
1. % Balita Gizi Buruk		1,21	< 1	< 0,9
2. % Kecamatan Bebas Rawan Gizi		100	80	> 80
KEADAAN LINGKUNGAN				
1. Persentase Rumah Sehat		89,76	≥ 80	90%
2. Persentase Tempat Umum Sehat		94,00	≥ 80	94,00
PERILAKU HIDUP BERSIH MASYARAKAT				
1. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS		35,76	≥ 65	65%
2. Persentase Posy. Purnama dan Mandiri		87,30	≥ 40	90%
AKSES DAN MUTU YANKES				
1. Persentase Pddk memanfaatkan Pusk		12,28	≥ 15	40%
2. Persentase Pddk memanfaatkan RS		-	≥ 1,5	-

Tabel 3.4.1

Untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih masyarakat dibutuhkan indikator. Indikator tersebut merupakan alat bagi semua pihak yang ikut terlibat dapat menilai sendiri kemajuan yang sudah dilakukan dan menjadi tolok ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya. Setiap daerah dapat memilih, menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka untuk

memenuhi indikator tersebut. Dengan demikian indikator yang dimuat dalam pedoman ini merupakan daftar pilihan yang dapat dipilih oleh Forum bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan sektor terkait.

Besar indikator yang hendak dicapai oleh masing-masing Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi dari masing Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan. Penilaian terhadap indikator adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian kegiatan dari segi jangkauan dan output. Sumber data untuk menilai keberhasilan ini adalah daftar masalah yang dapat diatasi dari daftar yang disusun pada lokakarya perencanaan. Untuk penetapan pemilihan indikator agar memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Setiap daerah dapat memilih, menetapkan indikator sesuai dengan kegiatan, kondisi dan kemampuannya, dan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah. Setiap tahun sasaran indikator dan sasaran berkembang sesuai kondisi yang ada.
2. Forum bersama Pemerintah Daerah dapat memilih besaran indikator yang sesuai dengan kapasitasnya.
3. Pencapaian pendekatan Kabupaten/Kota Sehat tergantung dari kemampuan dari masing-masing daerah.
4. Indikator proses adalah cara mengukur seberapa jauh langkah-langkah Kabupaten/Kota Sehat sudah dilaksanakan di masing masing daerah:
 - a. dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, perda, penerapan dan pelibatan masyarakat.
 - b. aktivitas kelembagaan yang ada, yaitu forum kabupaten/kota sehat, forum komunikasi Kelurahan/ Desa sehat, Pokja dan Tim pembina.
5. Indikator output adalah pencapaian sasaran kegiatan yang telah disepakati masyarakat.
6. Indikator gerakan masyarakat antara lain ditunjukkan dengan adanya Adanya program percontohan; dana berputar, keterlibatan forum dan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan sektor; adanya kegiatan penyuluhan rutin/penyebarluasan informasi melalui media masa/pembuatan media (poster, leaflet, kesenian tradisional dll) atau pertemuan/seminar/workshop, di/atau Forum menyampaikan konsep pemecahan masalah kepada Pemerintah Daerah/sektor tentang program yang disepakati.
7. Menu kegiatan menurut tatanan dan jenis indikator adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator Pokok
 - 1) Belajar 9 tahun
 - 2) Angka melek huruf
 - 3) Pendapatan perkapita domestik
 - 4) Angka kematian bayi per-1000 Kh

- 5) Angka kematian balita per-1000 Kh
- 6) Angka kematian ibu melahirkan per-1000 Kh
- 7) Adanya RUTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota)
- 8) Program dana sehat dan jaminan sosial nasional bagi masyarakat miskin

b. Indikator Umum

- 1) Adanya dukungan Pemda
- 2) Adanya program pendukung disektor
- 3) Berfungsinya tim pembina kab/kota dan kecamatan
- 4) Berfungsinya forum kab/kota
- 5) Adanya sekretariat forum
- 6) Berfungsinya forum komunikasi kelurahan/desa
- 7) Berfungsinya pokja kelurahan/desa
- 8) Adanya kesepakatan masyarakat dan Pemda tentang pilihan tatanan dan kegiatan
- 9) Adanya perencanaan forum yang disepakati masyarakat dan Pemda
- 10) Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum /forum komunikasi pokja

c. Indikator Khusus

- 1) Kawasan Pemukiman Sehat Sarana Dan Prasarana Sehat
 - a) Udara bersih
 - i. Memenuhi standar ISPU
 - ii. Kendaraan bermotor memenuhi syarat emisi
 - iii. Peningkatan penggunaan bahan bakar yang memenuhi syarat
 - iv. Penurunan kasus gangguan pernapasan (ISPA/pneumonia)
 - v. Penurunan kasus TB paru
 - b) Air sungai bersih
 - i. Terlarang membuang sampah ke sungai
 - ii. Terlarang membuang kotoran manusia ke sungai
 - iii. Terlarang membuang sampah limbah industri ke sungai
 - iv. Adanya penataan fisik bantaran sungai
 - c) Penyediaan air bersih individu dan umum
 - i. Meningkatnya cakupan penggunaan air bersih
 - ii. Meningkatnya cakupan kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan
 - iii. Meningkatnya % masyarakat yang memeriksakan airnya ke laboratorium
 - iv. Penurunan kasus diare
 - d) Pembuangan air limbah domestik (rumah tangga)
 - i. Sistem pengolahan limbah kota memenuhi syarat
 - ii. Adanya gerakan masyarakat dalam pembangunan SPAL / jamban
 - iii. Cakupan penggunaan sarana air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat
 - iv. Sekolah bebas jentik nyamuk
 - v. Penurunan kasus filariasis (kaki gajah)

- e) Pengelolaan sampah
 - i. Sampah tidak menumpuk di TPS/pemukiman
 - ii. Terlaksananya pemisahan sampah basah dengan sampah lainnya
 - iii. TPA tidak mencemari lingkungan
 - iv. Angka kepadatan lalat
 - v. Angka jentik aedes
 - vi. Terlaksananya program PSN 3 M, disekolah, di tempat-tempat umum
- f) Perumahan dan pemukiman
 - i. Adanya sarana fasilitas umum
 - ii. Bebas jentik aedes
 - iii. Bebas banjir
 - iv. Meningkatnya rumah sehat yang memenuhi syarat
 - v. Menurunnya keluhan kesehatan akibat pencemaran industri/pertambangan
 - vi. Tidak terjadi KLB penyakit diare dan DBD atau malaria
 - vii. Meningkatnya pemanfaatan puskesmas
 - viii. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan 4 (empat) spesialis dasar
- g) Pertamanan dan hutan kota
 - i. Tersedianya taman dan pertanaman
 - ii. Adanya pengaturan pemeliharaan hutan
- h) Sekolah
 - i. Adanya kegiatan UKS dan organisasi PB3
 - ii. Meningkatkan kesehatan murid
 - iii. Terlaksananya program olahraga yang terencana
 - iv. Menurunnya jumlah peserta didik putus sekolah
- i) Pengelolaan pasar
 - i. Keamanan dan kenyamanan terjamin
 - ii. Pemeliharaan kebersihan oleh pedagang
 - iii. Tersedianya sarana mencegah kebakaran
 - iv. Toilet umum terjaga kebersihannya
 - v. Pasar yang memenuhi persyaratan
 - vi. Terlaksananya program jaminan kesehatan pada pedagang
- j) Sarana olahraga dan rekreasi dan tempat bermain anak-anak
 - i. Tersedianya sarana prasarana untuk berolah raga
 - ii. Tersedianya tempat bermain untuk anak-anak
 - iii. Tersedianya pelayanan kesehatan olah raga
 - iv. Meningkatnya derajat kesegaran/kebugaran jasmani masyarakat
 - v. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok masyarakat berolah raga secara teratur dan terukur
- k) Penataan sektor informal (pedagang kaki/asongan, industri rumah tangga)
 - i. Adanya penataan sektor informal
 - ii. Tidak menimbulkan pencemaran

- iii. Adanya program untuk meningkatkan perekonomian pedagang
 - iv. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja
- 2) Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi
- a) Pelayanan angkutan
 - i. Terpenuhi persyaratannya kendaraan umum (bus, angkot, umum yang bersih dan higienis, taxi) serta bebas rokok
 - ii. Terpenuhi persyaratannya emisi kendaraan bermotor
 - iii. Bebas dari kebisingan
 - iv. Jaminan keamanan angkutan barang dan pangan
 - v. Adanya pemeriksaan kendaraan secara rutin
 - b) Pelayanan terminal dan halte
 - i. Terpenuhi persyaratannya udara ambien di terminal
 - ii. Terpenuhi pengaturan jalur kendaraan yang aman bagi penumpang
 - iii. Tersedianya pelayanan gawat darurat di puskesmas daerah rawan kecelakaan
 - iv. Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas
 - c) Rawan kecelakaan
 - i. Pertolongan yang cepat dari kecelakaan
 - ii. Tersedianya peringatan perambuan di daerah rawan kecelakaan
 - iii. Tersedianya pelayanan gawat darurat di puskesmas daerah rawan kecelakaan
 - iv. Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas
 - d) Penataan
 - i. Tingkat kepadatan kendaraan/kemacetan
 - ii. Pengaturan jalur kendaraan umum, pribadi, sepeda motor, dan pejalan kaki
 - e) Tertib lalu lintas dan keselamatan
 - i. Terlaksananya gerakan disiplin berlalu lintas
 - ii. Menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas
 - f) Kemasyarakatan
 - i. Terlaksananya persyaratannya pemberian SIM baru dan perpanjangan
 - ii. Terlaksananya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan
 - iii. Tersedianya bengkel yang berakreditasi
- 3) Kawasan Pariwisata Sehat
- a) Informasi wisata dan kesehatan
 - i. Adanya informasi obyek wisata
 - ii. Adanya informasi tentang kesehatan
 - b) Sarana pariwisata
 - i. Sertifikat layak hotel meningkat
 - ii. Sertifikat layak restoran meningkat
 - iii. Tidak mencemari lingkungan
 - iv. Terjaminnya kebersihan lingkungan
 - c) Obyek dan daya tarik wisata
 - i. Peningkatan jumlah wisatawan

- d) Pelayanan kesehatan
 - i. Terselenggaranya asuransi kesehatan bagi wisatawan
 - ii. Kesehatan petugas penjamah makanan di restoran memenuhi syarat
 - iii. Tidak terjadi keracunan makanan
 - iv. Penurunan kasus kecelakaan obyek wisata
 - e) Sarana penunjang
 - i. Adanya sarana telekomunikasi
 - ii. Tersedianya sarana dasar (air bersih, jalan, limbah, dan sampah)
 - iii. Tersedianya sarana transportasi wisatawan yang memadai
 - iv. Tersedianya sarana tanggap darurat
 - f) Kemasyarakatan
 - i. Penurunan kasus gangguan keamanan (kerusuhan, anak jalanan, asongan, kriminal, dll)
 - ii. Peningkatan kepadatan masyarakat
 - iii. Terselenggaranya pendidikan/latihan/kursus bagi masyarakat pemandu pariwisata/pramu wisata
- 4) Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat
- a) Lingkungan fisik industri
 - i. Industri/perkantoran sesuai dengan RUTRK/RDTRK
 - ii. Pemukiman di sekitar kawasan industri, tidak kumuh
 - iii. Emisi/effluent memenuhi persyaratan
 - iv. Tersedianya ruangan khusus untuk merokok
 - b) Lingkungan fisik kantor dan perdagangan
 - i. Bangunan memenuhi persyaratan fisik dan hygiene
 - ii. Tidak mencemari lingkungan
 - c) Penataan sektor informal (industri kecil/rumah tangga)
 - i. Adanya penataan sektor informal
 - ii. Meningkatnya penataan sektor informal
 - iii. Penataan hygiene dan sanitasi sarana sektor informal
 - iv. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja
 - d) Keselamatan dan kesehatan kerja dan pencegahan kecelakaan dan rudapaksa
 - i. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
 - ii. Penurunan kasus penyakit akibat kerja
 - iii. Menurunnya angka kematian dan kecacatan karena keselamatan kerja
 - iv. Emisi/effluent memenuhi syarat
 - v. Tempat kerja bebas dari bising
 - e) Sosial ekonomi dan budaya dan kesehatan masyarakat
 - i. Meningkatnya kesempatan kerja atau berusaha bagi masyarakat sekitar
 - ii. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
 - iii. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban
 - iv. Tersedianya pendidikan/latihan kursus bagi tenaga kerja

- 5) Ketahanan Pangan dan Gizi
 - a) Ketersediaan
 - i. Terlaksananya intensifikasi pertanian dan pola tanah
 - ii. Masyarakat menyediakan lumbung pangan
 - iii. Pemerintah menyediakan buffer stock
 - b) Distribusi
 - i. Berfungsinya lembaga distribusi pangan yang ada dimasyarakat (koperasi,dll)
 - c) Konsumsi
 - i. Terjangkaunya daya beli masyarakat
 - ii. Meningkatnya KEP total
 - iii. Masyarakat mengkonsumsi makanan secara B3 (bergizi, beragam, berimbang)
 - iv. Menurunnya proporsi balita dengan gizi buruk
 - v. Berfungsi lembaga untuk konsultan gizi
 - d) Kewaspadaan
 - i. Penurunan kasus gizi berlebih
 - ii. Bebas keracunan pestisida pada petani
 - iii. Kecamatan bebas rawan pangan
 - iv. Menurunnya penderita kretin baru
 - v. Kecamatan bebas rawan gizi
 - e) Kemasyarakatan
 - i. Adanya kegiatan kelompok masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah gizi
 - ii. Meningkatnya pendapatan petani
 - iii. Petani mendapatkan pelatihan pengendalian hama terpadu dan penggunaan pestisida
- 6) Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri
 - a) Perilaku hidup bersih dan sehat
 - i. Meningkatkan kegiatan kelompok bersih dan sehat masyarakat berolah raga secara teratur
 - ii. Meningkatkan kegiatan kelompok masyarakat penanggulangan NAPZA
 - iii. Meningkatkan kegiatan kelompok masyarakat penanggulangan HIV-AIDS
 - iv. Meningkatkan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak merokok, aktifitas fisik setiap hari dan gizi seimbang)
 - b) Tempat-tempat umum
 - i. Tempat-tempat umum laik sehat (hotel, taman rekreasi, tempat hiburan, dll)
 - ii. Tidak terjadi kasus keracunan difasilitas penyediaan makanan
 - iii. Adanya kemudahan untuk orang cacat tubuh
 - iv. Jasa boga, restoran/rumah makan dan tempat pengolahan makanan lain laik sehat
 - v. Menurunnya kasus legionellosis di tempat umum

- vi. Adanya kawasan bebas rokok ditempat umum
- c) Pemukiman, perumahan, dan bangunan sehat
 - i. Peningkatan rumah sehat yang memenuhi syarat perumahan dan memenuhi syarat bangunan sehat
 - ii. Bebas dari pencemaran industri
 - iii. Penurunan kasus penyakit yang terkait dengan lingkungan
 - iv. Adanya program perbaikan rumah sehat oleh masyarakat
- d) Penyediaan air bersih
 - i. Kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan
 - ii. Tercapainya kualitas bakteriologis
 - iii. Peningkatan cakupan air bersih
 - iv. Penurunan kasus diare
 - v. Masyarakat memeriksakan airnya ke laboratorium
- e) Kesehatan dan keselamatan kerja pencegahan kecelakaan dan rudapaksa
 - i. Berfungsinya institusi pembina kesehatan dan keselamatan
 - ii. Limbah industri diolah secara aman dan sehat
 - iii. Tempat kerja memenuhi persyaratan kesehatan
 - iv. Pekerja mendapat pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja peripurna
 - v. Penurunan kasus kecelakaan kerja
 - vi. Penurunan kasus penyakit akibat kerja
 - vii. Adanya pemantauan perilaku buruh dalam K3
 - viii. Menurunnya angka kematian dan kecacatan karena kecelakaan dan rudapaksa di rumah, jalan raya, sekolah, tempat umum
- f) Kesehatan keluarga, reproduksi KB
 - i. Berkembangnya kelompok masyarakat peduli dalam pelayanan kesehatan
 - ii. Tersedianya fasilitas pelayanan konseling remaja
 - iii. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pada siswa SD oleh tenaga kesehatan terlatih/guru UKS
 - iv. Terlaksananya program dokter kecil di sekolah dasar
 - v. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
- g) Pembinaan kesehatan jiwa masyarakat dan pola asuh anak
 - i. Tersedianya akses/keterjangkauan pelayanan kesehatan puskesmas
 - ii. Penurunan kasus gangguan kesehatan mental
 - iii. Tersedianya pelayanan konseling di klinik swasta
 - iv. Peningkatan kelompok masyarakat yang mampu memfasilitasi pelatihan *life skills* bagi remaja
- h) Kesehatan olah raga dan kebugaran jasmani
 - i. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolah raga yang teratur dan jasmani terukur
 - ii. Meningkatnya derajat kesegaran/kebugaran jasmani masyarakat

- iii. Tersedianya pelayanan kesehatan olah raga pada masyarakat
- i) Program anti tembakau
 - i. Adanya gerakan anti merokok, alkohol, dan narkoba dimasyarakat
 - ii. Meningkatnya lingkungan bebas rokok di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan tempat umum
 - iii. Tercapainya kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan obat/narkoba
 - iv. Tersedianya klinik pelayanan penanggulangan obat/narkoba
 - v. Menurunnya prevalensi perokok dan penyalahgunaan obat/narkoba
- j) Imunisasi
 - i. Meningkatnya cakupan UCI
 - ii. Menurunnya Acute Flaccid Paralysis (AFP)
 - iii. Meningkatnya masyarakat yang melakukan imunisasi secara mandiri
 - iv. Tersedianya informasi tentang bahaya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
 - v. Meningkatnya akses penduduk pada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan imunisasi
- k) Pelayanan pengobatan dan perawat
 - i. Meningkatnya penggunaan posyandu purnama dan mandiri
 - ii. Meningkatnya penggunaan rumah sakit
 - iii. Tersedianya pelayanan kesehatan dirumah sakit bagi GAKIN
 - iv. Meningkatnya pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat
- l) Pemberantasan malaria
 - i. Menurunnya angka kesakitan malaria
 - ii. Masyarakat berperan serta dalam sistem kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan fokus serta KLB
 - iii. Adanya intervensi lingkungan pada tempat perindukan nyamuk
 - iv. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan malaria di daerah pariwisata dan PETI (Pertambangan Tanpa Ijin)
- m) Pemberantasan penyakit DB
 - i. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis
 - ii. Masyarakat berperan serta dalam sistem kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan fokus serta KLB
 - iii. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum
 - iv. Bebas jentik aedes
- n) Pemberantasan TB paru
 - i. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita paru TB
 - ii. Meningkatnya angka kesembuhan penderita TB paru BTA

- o) Pemberantasan diare
 - i. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, air bersih, dan jamban)
 - ii. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam
 - p) Pencegahan penyakit sehat degeneratif
 - i. Meningkatnya kelompok jantung sehat serta kencing manis dimasyarakat termasuk orang sehat
 - ii. Tersedianya informasi resiko dan upaya pencegahan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, kencing manis, dan kanker
 - iii. Meningkatnya upaya pengawetan berkala jantung sehat melalui kelompok jantung sehat
 - q) Gizi
 - i. Adanya kegiatan kelompok masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah gizi
 - ii. Meningkatkan KEP pada ibu hamil
 - iii. Menurunnya penderita kretin baru
 - iv. Menurunnya ibu hamil yang anemia dan kekurangan yodium
 - v. Menurunnya masyarakat kekurangan vitamin A
 - vi. Penurunan kasus gizi berlebih
 - vii. Kecamatan bebas rawan gizi
 - viii. Menurunnya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
 - ix. Persentase bayi mendapat ASI eksklusif
 - x. Meningkatnya persentase keluarga sadar gizi
 - r) JPKM
 - i. Meningkatnya proporsi penduduk yang terlindung dengan berbagai bentuk JKP prabayar (30% pada tahun 2005, 80% pada tahun 2010)
 - ii. Terlindunginya penduduk miskin dengan jaminan pemeliharaan kesehatan/kartu sehat (80% atau lebih pada tahun 2005, 100% pada tahun 2010)
- 7) Kehidupan Sosial yang Sehat
- a) Penanganan kemiskinan dan ketunaan sosial (fakir miskin, korban napza, anak jalanan, pengemis dan gelandangan, tuna susila)
 - i. Meningkatnya penyuluhan sosial
 - ii. Terselenggaranya pendidikan/ketrampilan informasi
 - iii. Peningkatan penyaluran untuk bekerja
 - iv. Terselenggaranya pemantauan kesehatan secara kontinyu
 - v. Tersedianya pengembangan kreativitas anak dan produktivitas lanjut usia
 - b) Penanganan kecacatan (cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental)
 - i. Meningkatnya penyuluhan sosial
 - ii. Terselenggaranya pendidikan/ketrampilan sesuai dengan kecacatan
 - iii. Meningkatnya kesempatan mendapatkan pekerjaan

- iv. Adanya dukungan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kecacatan
 - v. Adanya akses terhadap pelayanan kesehatan
- c) Penanganan komunitas adat terpencil
- i. Adanya interaksi sosial antar masyarakat adat terpencil dengan masyarakat umum
 - ii. Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan
 - iii. Adanya akses transportasi
 - iv. Adanya program untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
 - v. Meningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan
- d) Penanganan ketelantaran (anak, lanjut usia/jompo)
- i. Terpenuhinya penitipan bayi, anak dan lanjut usia/jompo yang saniter dan higienis
 - ii. Terselenggaranya pemantauan kesehatan secara kontinyu
 - iii. Tersedianya pengembangan kreativitas anak dan usila
 - iv. Adanya kegiatan meningkatkan produktivitas usila
- e) Penanggulangan korban bencana, kekerasan (anak, wanita, dan usia lanjut) dan kerusuhan
- i. Meningkatnya jumlah posko penanggulangan korban bencana
 - ii. Meningkatnya kelancaran komunikasi antar posko dan pemerintah
 - iii. Masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan bencana
 - iv. Menurunnya jumlah tindak kekerasan dan kerusuhan
 - v. Persentase kabupaten/kota mempunyai contingency plan masalah kesehatan bencana

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi merupakan suatu potret keadaan masa depan yang diharapkan, mewakili tuan yang global dan berjalan terus, berjangka panjang serta menyediakan suatu dasar/fondasi atau arah bagi suatu sistem perencanaan pembangunan. Visi senantiasa menggambarkan suatu masa depan yang ideal bagi masyarakat serta merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam proses perencanaan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan serta mengatasi kesenjangan yang terjadi. Dalam hal ini visi Kota Sehat merupakan visi yang menggambarkan arah penyelenggaraan Kota Sehat dalam lima tahun ke depan dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, serta program prioritas pembangunan Kepala Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Oleh karena itu Visi Penyelenggaraan Kota Sehat adalah :

“DENPASAR KOTA SEHAT DAN CERDAS 2021”

4.2 MISI

Agar visi diatas dapat diwujudkan maka perlu adanya rumusan lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan yang sering disebut dengan misi. Misi yang baik dapat membantu menggambarkan dengan lebih jelas visi yang ingin dicapai serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan penjelasan ini maka rumusan misi Kota Sehat adalah :

1. Mengembangkan kawasan pemukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas.
2. Mengembangkan kawasan Industri, Perkantoran, dan Pariwisata yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan.
4. Mewujudkan tata kelola Kota Sehat yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

4.3 TUJUAN

Dalam rangka lebih mengoperasionalkan pencapaian visi dan misi, penting untuk dirumuskan tujuan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta menangani isu strategis dalam penyelenggaraan Kota Sehat. Rumusan tujuan ini dibuat sebagai dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dari masing-masing misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mengembangkan kawasan pemukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas mempunyai tujuan:
Mempercepat terwujudnya kawasan pemukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas
2. Misi 2 : Mengembangkan kawasan Industri, Perkantoran, dan Pariwisata yang berkelanjutan mempunyai tujuan :
Meningkatkan kawasan industri, Perkantoran, dan Pariwisata yang berkelanjutan
3. Misi 3 : Meningkatkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan mempunyai tujuan :
Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan
4. Misi 4 : Mewujudkan tata kelola Kota Sehat yang akuntabel, transparan, dan partisipatif mempunyai tujuan :
Meningkatkan peranan stakeholder dalam mengelola Kota Sehat

4.4 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Untuk mencapai tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Sasaran dari masing-masing tujuan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mengembangkan kawasan pemukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas mempunyai tujuan :
Tujuan Mempercepat terwujudnya kawasan pemukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas Kawasan Pemukiman untuk pernghidupan masyarakat yang lebih baik.
 - b. Terciptanya sarana dan prasarana umum untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat.
 - c. Terwujudnya sarana lalu lintas dan transportasi yang aman, nyaman dan ramah lingkungan
2. Misi 2 : Mengembangkan kawasan Industri, Perkantoran, dan Pariwisata yang berkelanjutan mempunyai mempunyai tujuan :
Tujuan Meningkatkan kawasan Industri, Perkantoran, dan Pariwisata yang berkelanjutan dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Terciptanya kawasan industri yang berdaya saing dan perkantoran yang sehat.
 - b. Terciptanya kawasan pariwisata yang layak secara ekonomi, diterima secara sosial budaya dan ramah lingkungan.
3. Misi 3 : Meningkatkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan mempunyai tujuan :
Tujuan Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang berkualitas .
 - b. Tercapainya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri
 - c. Tercapainya pelayanan dan perlindungan kehidupan social yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat

4. Misi 4 : Mewujudkan tata kelola Kota Sehat yang akuntabel, transparan, dan partisipatif mempunyai tujuan :

Tujuan Meningkatkan peranan stakeholder dalam mengelola Kota Sehat dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Tercapainya tupoksi tim pembina dan tim teknis.
- b. Tercapainya tupoksi forum kota sehat.
- c. Tercapainya tupoksi forum komunikasi desa/kelurahan sehat.
- d. Tercapainya tupoksi kelompok kerja desa/kelurahan sehat.

4.5 STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan. Adapun strategi dalam pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tujuan pertama dari misi 1 adalah Mempercepat terwujudnya kawasan pemukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas, tujuan ini mempunyai sasaran :
 - a. Sasaran Peningkatan kualitas Kawasan Pemukiman untuk pernghidupan masyarakat yang lebih baik dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan penyehatan lingkungan pemukiman
 - 2) Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau public
 - 3) Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat bagi anak usia sekolah
 - 4) Membina pengelola dan pelaku usaha
 - b. Sasaran Terciptanya sarana dan prasarana umum untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kualitas udara, air sungai
 - 2) Mencegah kerusakan lingkungan akibat air limbah dan sampah
 - c. Sasaran Terwujudnya sarana lalu lintas dan transportasi yang aman, nyaman dan ramah lingkungan dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas
 - 2) Meningkatkan tertib lalu lintas
2. Tujuan pertama dari misi 2 adalah Meningkatkan kawasan Industri, Perkantoran, dan Pariwisata yang berkelanjutan mempunyai sasaran :
 - a. Sasaran terciptanya kawasan industri yang berdaya saing dan perkantoran yang sehat dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) Mendorong pemenuhan persyaratan sebaran peruntukan industri, kawasan perkantoran dan perdagangan.
 - 2) Memberikan peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah.
 - b. Sasaran terciptanya kawasan pariwisata yang layak secara ekonomi, diterima secara sosial budaya dan ramah lingkungan dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) Mendorong tersedianya informasi, kelayakan fungsi dan penataan kawasan pariwisata sehat.
 - 2) Mendorong terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing.
3. Tujuan pertama dari misi 3 adalah Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan mempunyai sasaran :
 - a. Sasaran tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang berkualitas dengan strategi sebagai berikut :

Menjamin pemenuhan pangan untuk gizi yang lebih berkualitas.
 - b. Sasaran tercapainya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) Mendorong peningkatan kualitas Kehidupan Masyarakat yang sehat dan mandiri melalui pola hidup sehat, keluarga kecil untuk terciptanya lingkungan yang sehat.
 - 2) Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional.
 - 3) Memberikan makanan tambahan dan pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat.

- c. Sasaran tercapainya pelayanan dan perlindungan kehidupan social yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat dengan strategi sebagai berikut :
Memberikan penanganan terhadap kemiskinan dan ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, bencana, kekerasan dan kerusakan.
- 4. Tujuan pertama dari misi 4 adalah Meningkatkan peranan stakeholder dalam mengelola Kota Sehat, mempunyai sasaran :
 - a. Sasaran Tercapainya tupoksi tim pembina dan tim teknis dengan strategi sebagai berikut :
Mengembangkan integrasi, sinkronisasi program kota sehat dengan program pembangunan.
 - b. Sasaran Tercapainya tupoksi forum kota sehat dengan strategi sebagai berikut :
Mensinkronkan tata kelola kota sehat di tingkat kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
 - c. Sasaran Tercapainya tupoksi forum komunikasi desa/kelurahan sehat sebagai berikut :
Mensinkronkan tata kelola kota sehat di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
 - d. Sasaran Tercapainya tupoksi kelompok kerja desa/kelurahan sehat dengan strategi sebagai berikut :
Mensinkronkan tata kelola kota sehat di tingkat Desa/Kelurahan.

4.6 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas maka arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapainya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Tujuan pertama dari misi 1 adalah Mempercepat terwujudnya kawasan pemukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas, tujuan ini mempunyai sasaran :
 - a. Sasaran Peningkatan kualitas Kawasan Pemukiman untuk penghidupan masyarakat yang lebih baik dicapai dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) Strategi Meningkatkan penyehatan lingkungan pemukimandilaksanakan dengan arah kebijakan :
Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang sehat.
 - 2) Strategi Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau public dengan arah kebijakan :
 - a) Menyediakan RTH kota.
 - b) Penyediaan taman bermain ramah anak.
 - 3) Strategi Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat bagi anak usia sekolah dilaksanakan dengan arah kebijakan.
Melakukan sosialisasi perilaku hidup sehat disekolah.
 - 4) Strategi Membina pengelola dan pelaku usaha dengan arah kebijakan :
 - a) Mengembangkan pola manajemen pasar yang memiliki daya saing.
 - b) Mendorong peningkatan kewirausahaan sektor informal.
 - b. Sasaran Terciptanya sarana dan prasarana umum untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat dicapai dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) StrategiMeningkatkan kualitas udara, air sungai dengan arah kebijakan :
Mengendalikan kualitas udara, air dan sungai untuk tetap bersih dan sehat.
 - 2) StrategiMencegah kerusakan lingkungan akibat air limbah dan sampah dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Pengelolaan air limbah dan sampah secara terpadu
 - c. Sasaran Terwujudnya sarana lalu lintas dan transportasi yang aman, nyaman dan ramah lingkungan dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) StrategiMeningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Mewujudkan pelayanan angkutan umum yang berkualitas
 - 2) Strategi Meningkatkan tertib lalu lintas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a) Mengurangi angka kecelakaan.
 - b) Menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman.

2. Tujuan pertama dari misi 2 Meningkatkan kawasan Industri, Perkantoran, dan Pariwisata mempunyai sasaran :
 - a. Sasaran terciptanya kawasan industri yang berdaya saing dan perkantoran yang sehat dicapai dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) Strategi Mendorong pemenuhan persyaratan sebaran peruntukan industri, kawasan perkantoran dan perdagangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Mengendalikan sebaran peruntukan industri, kawasan perkantoran dan perdagangan serta menata sektor informal.
 - 2) Strategi Memberikan peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Menjamin pengembangan potensi unggulan daerah dan keselamatan kerja.
 - b. Sasaran Terciptanya kawasan pariwisata yang layak secara ekonomi, diterima secara sosial budaya dan ramah lingkungan dicapai dengan strategi sebagai berikut :
 - 1) Strategi Mendorong tersedianya informasi, kelayakan fungsi dan penataan kawasan pariwisata sehat dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Menyediakan informasi kelayakan fungsi dan penataan kawasan pariwisata sehat.
 - 2) Strategi Mendorong terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Meningkatkan pembinaan SDM yang berdaya saing.
3. Tujuan pertama dari misi 3 adalah Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan mempunyai sasaran :
 - a. Sasaran tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang berkualitas dicapai dengan strategi :
 - 1) Strategi Menjamin pemenuhan pangan untuk gizi yang lebih berkualitas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Pemenuhan pangan untuk gizi yang lebih berkualitas.
 - b. Sasaran peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri dicapai dengan strategi :
 - 1) Strategi Mendorong peningkatan kualitas Kehidupan Masyarakat yang sehat dan mandiri melalui pola hidup sehat, keluarga kecil untuk terciptanya lingkungan yang sehat dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a) Perilaku hidup bersih dan sehat.
 - b) Tempat-tempat umum.
 - c) Permukiman, perumahan, dan bangunan sehat.
 - d) Penyediaan air bersih.
 - e) Kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan dan rudapaksa.
 - 2) Strategi Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri.
 - 3) Strategi Memberikan makanan tambahan dan pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan :
Pemenuhan gizi dan memberikan kemudahan pelayanan kesehatan
4. Tujuan pertama dari misi 4 adalah Meningkatkan peranan stakeholder dalam mengelola kota sehat, mempunyai sasaran :
 - a. Sasaran Tercapainya tupoksi tim pembina dan tim teknis dicapai dengan strategi sebagai berikut :
Strategi Mengembangkan integrasi, sinkronisasi program kota sehat dengan program pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Membina penyelenggaraan kota sehat sesuai dengan kewenangan
 - b. Sasaran Tercapainya tupoksi forum kota sehat dicapai dengan strategi sebagai berikut :
Strategi Mensinkronkan tata kelola kota sehat di tingkat kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Mengkordinasikan penyelenggaraan kota sehat di tingkat kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
 - c. Sasaran Tercapainya tupoksi forum komunikasi desa/kelurahan sehat dicapai dengan strategi sebagai berikut :
Strategi Mensinkronkan tata kelola kota sehat di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- Mengkordinasikan penyelenggaraan kota sehat di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- d. Sasaran Tercapainya tupoksi kelompok kerja desa/kelurahan sehatdicapai dengan strategi :
- Strategi Mensinkronkan tata kelola kota sehat di tingkat Desa/Kelurahandilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Mengkordinasikan penyelenggaraan kota sehat di tingkat Desa/Kelurahan.

4.7 Prioritas

Mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Sehat, banyak upaya dan program yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam tahapan oleh pemerintah bersama masyarakat, baik program yang bernuansa promotif, preventif dan kuratif maupun bersifat rehabilitatif. Maka dari program yang dijabarkan dalam kegiatan perlu penyusunan skala prioritas yang melibatkan sektor terkait.

MATRIKS KOTA SEHAT DI KOTA DENPASAR TAHUN 2017-2021

Visi : Denpasar Kota Sehat dan Cerdas 2021

Misi1: Mengembangkan kawasan permukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas

Tabel 4.1

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mempercepat terwujudnya Kawasan permukiman dan pelayanan transportasi yang sehat dan cerdas	Peningkatan kualitas Kawasan permukiman untuk penghidupan masyarakat yang lebih baik	Meningkatkan penyehatan lingkungan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang sehat	Perumahan dan Perumahan	Penyediaan sarana fasilitas umum	17,5 Km	19 Km	19 Km	19 Km	19 Km	Dinas Pekerjaan Umum
						Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan perumahan	30 Kali	30 Kali	30 Kali	30 Kali	30 Kali	Dinas Pekerjaan Umum

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Penyuluhan dan pengawasan sanitasi perumahan dan permukiman	30 Kali	30 Kali	30 Kali	30 Kali	30 Kali	Dinas Pekerjaan Umum
						Peningkatan pelayanan puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka	Menyediakan RTH Kota	Per tamanan dan Hutan Kota	Penataan taman kota	4 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	4 lokasi	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi						Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			hijau publik			Pe melihara an taman kota	9 lokasi	13 lokasi	15 lokasi	17 lokasi	19 lokasi	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
				Penyediaan taman bermain ramah anak	Sarana Olahraga dan rekreasi tempat bermain anak-anak	Penyediaan sarana olahraga dan tempat bermain pada taman kota	1 lokasi	0	1 lokasi	0	1 lokasi	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
			Meningkatkan kesadaran prilaku hidup sehat bagi	Melakukan sosialisasi perilaku hidup sehat di sekolah	Sekolah	Lomba UKS TK	5 TK	5 TK	5 TK	5 TK	5 TK	Dinas Kesehatan	
						Lomba UKS SD	5 SD	5 SD	5 SD	5 SD	5 SD	Dinas Kesehatan	
						Lomba UKS	5 SMP	5 SMP	5 SMP	5 SMP	5 SMP	Dinas Kesehatan	

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi						Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			anak usia sekolah			SMP							
						Lomba UKS SMA/MK	5 SMA/MK	5 SMA/MK	5 SMA/MK	5 SMA/MK	5 SMA/MK	Dinas Kesehatan	
					Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Meningkatkan wawasan pemuda pelajar dalam ber kreativitas di bidang seni dan budaya	45 org	50 org	50 org	50 org	50 org	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
					Festival Lomba Seni Siswa yang kreatif	Meningkatkan wawasan seni siswa yang kreatif	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Sekolah	Penyelenggaraan vaksinasi anak sekolah	98%	98%	98%	98%	98%	Dinas Kesehatan
			Membina pengelola dan pelaku usaha	Me ngembang kan pola manaje men pasar yang memiliki daya saing	Kebersihan pasar yang dikelola PD. Pasar Kota Denpasar	Me Laksana kan kebersihan an di lingkungan an pasar	Seluruh pasar yang dikelola PD Pasar	Seluruh pasar yang dikelola PD Pasar	Seluruh pasar yang dikelola PD Pasar	Seluruh pasar yang dikelola PD Pasar	Seluruh pasar yang dikelola PD Pasar	PD. PASAR
						Pe ngangkut an sampah dari unit pasar ke TPA	Dari unit pasar ke TPA	Dari unit pasar ke TPA	Dari unit pasar ke TPA	Dari unit pasar ke TPA	Dari unit pasar ke TPA	PD. PASAR

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kebersihan an KM/WC Umum	KM/WC Umum di Unit-unit pasar	KM/WC Umum di Unit-unit pasar	KM/WC Umum di Unit-unit pasar	KM/WC Umum di Unit-unit pasar	KM/WC Umum di Unit-unit pasar	PD. PASAR
					Keamanan pasar yang dikelola	Pelatihan petugas keamanan pasar	152 Orang	152 Orang	152 Orang	152 Orang	152 Orang	PD. PASAR
					PD. Pasar Kota Denpasar	Kamera CCTV	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	
					Kebersihan an pasar yang dikelola	Petugas kebersihan an	161 Orang	161 Orang	161 Orang	161 Orang	161 Orang	Dinas Kebersihan dan Pertanaman
					PD. Pasar Kota Denpasar	Pengangkutan sampah	59 Unit	59 Unit	59 Unit	59 Unit	59 Unit	Dinas Kebersihan dan Pertanaman

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Hidran air dan tabung pemadam kebakaran	Tabung pemadam kebakaran	138 Tabung	138 Tabung	138 Tabung	138 Tabung	138 Tabung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Kebersihan kamar mandi/WC umum di pasar	Petugas kebersihan	23 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	Dinas Kebersihan dan Pertanaman

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jaminan kesehatan pedagang	PD Pasar bekerja dengan Klinik Rama Sesama	Pedagang di unit-pasar yang dikelola oleh PD.	Pedagan g di unit- unit pasar yang dikelola oleh PD.	Pedagan g di unit- unit pasar yang dikelola oleh PD.	Pedagang di unit-unit pasar yang dikelola oleh PD.	Pedagang di unit-unit pasar yang dikelola oleh PD.	PD PASAR
					Pengelola an Pasar	Pembina an pasar tradisional	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	BPM
						Pembina an UED (Usaha Ekonomi	43 desa/ Kelurahan an	43 desa/ Kelurahan an	43 desa/ Kelurahan an	43 desa/ Kelurahan an	43 desa/ Kelurahan An	DISPERIN DAG

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Desa)						
				Men dorong peningkat an ke wirausaha an sektor informal	Penataan Sektor Informal	Penyeleng garaan pelatihan ke wirausaha an	1x20 org	1x20 org	1x20 org	1x20 org	1x20 org	DISPERIN DAG
						Pembina an pedagang kaki lima	200 UKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM	DISPERIN DAG
		Terciptanya Sarana dan prasarana umum untuk mewujudkan kualitas lingkungan	Meningkat kan kualitas udara, air, sungai	Me ngendali kan kualitas udara, air, dan sungai	Udara bersih	Pemantau an kualitas udara	18 lokasi	18 lokasi	18 lokasi	18 lokasi	18 lokasi	Badan Lingkungan Hidup
						Uji emisi kendaraan bermotor	1000 Kendara an	1000 Kendara an	1000 Kendara an	1000 Kendara an	1000 Kendara an	Badan Lingkungan Hidup

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		yang sehat		untuk tetap bersih dan sehat	Air Sungai bersih	Pengelolaan kebersihan sungai	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	Badan Lingkungan Hidup
						Pemantau an kualitas air sungai	41 titik	41 titik	41 titik	41 titik	41 titik	Badan Lingkungan Hidup
						Kajian pengguna an sarana air bersih	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Badan Lingkungan Hidup
					Penyedia an air bersih	Pe ngembang an pipa untuk SR (Sambung an Rumah) dan	Pe Ngemba ngan jaringan pipa distribusi di Jl. Gn Salak	Pengada an dan pemas an gan pipa PE diameter 150mm = 12.000 m	Pengada an dan pemas an gan pipa untuk pengant ian pipa ACP, JI	Pengada an dan pemas an gan pipa untuk pengant ian pipa ACP di JI	Pengada an dan pemas an gan pipa untuk pengant ian pipa ACO di JI	PDAM

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						tempat-tempat umum	<p>di Jalan By Pass Ngurah Rai</p> <p>Pengembangan dan pemasangan saluran pipa PE diameter 150mm = 600m di Jalan Diponegoro</p> <p>Pengembangan jaringan pipa distribusi di Jl. Keboiwo</p>	<p>Antasura dan Nangka</p> <p>Veteran, Jl Gajah Mada, Jl Udayana, Jl Hasa nudin, Jl Kenyeri, Jl Cokroami noto, Jl Patimura, Jl Supratman, Jl Surapati, Jl Hayam Wuruk</p>	<p>Diponegoro, Jl Kartini, Jl Abimanyu, Jl A Yani, Jl Kendedes, Jl Tk Balian</p>			

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Pengadaan dan pemasangan Air Siap Minum (AMO)					PDAM
						Pengujian kualitas air minum	320 titik	320 titik	320 titik	320 titik	320 titik	Dinas Kesehatan
						Penyuluhan pengguna air minum	Mengadakan kegiatan temu pelangan setiap tahun	Mengadakan kegiatan temu pelangan setiap tahun	Mengadakan kegiatan temu pelangan setiap tahun	Mengadakan kegiatan temu pelangan setiap tahun	Mengadakan kegiatan temu pelangan setiap tahun	PDAM
							Sosialisasi ke tiap-	Sosialisasi ke tiap-	Sosialisasi ke tiap-	Sosialisasi ke tiap-	Sosialisasi ke tiap-	PDAM

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							tiap banjar secara berkala	tiap banjar secara berkala	tiap banjar secara berkala	tiap banjar secara berkala	tiap banjar secara berkala	
			Men cegah kerusakan lingkungan akibat air limbah dan sampah	Pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu	Pembuangan air limbah domestik	Pembuatan jamban komunal (sanitasi masya rakat)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum
						Pembuatan IPAL komunal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum
						Kajian penggunaan sarana air limbah dan jamban	75 KSM	75 KSM	75 KSM	75 KSM	75 KSM	Badan Lingkungan Hidup

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						keluarga yang memenuhi syarat kesehatan						
					pengelola an sampah	Pengelola an sampah 3R di tingkat banjar						Dinas Kebersihan dan Pertanaman
						Penyedia an tempat-tempat sampah secara terpisah di tempat-tempat	75 unit tersebar di Kecamatan an	75 unit tersebar di Kecamatan an	75 unit tersebar di Kecamatan an	75 unit tersebar di Kecamatan an	75 unit tersebar di Kecamatan an	Dinas Kebersihan dan Pertanaman

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						umum						
						Sosialisasi waktu pembuangan sampah rumah tangga	12 x	12 x	12 x	12 x	12 x	Dinas Kebersihan dan Pertanaman
						Uji laik kendaraan umum	19000	19500	20000	20500	21000	Dinas Perhubungan
		Terwujudnya Sarana lalu lintas dan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan	Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas	Mewujudkan pelayanan angkutan umum yang berkualitas	Pelayanan angkutan umum	Penyusunan kajian sistem manajemen angkutan umum	-	Grand design angkutan kota	Perencanaan trayek baru	Pelaksanaan trayek baru	Evaluasi trayek baru	Dinas Perhubungan

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Peningkatan fasilitas moda angkutan umum	Pembinaan AKUT	Pembinaan ABDI YASA	Pembinaan ABDI YASA	Pembinaan ABDI YASA	Pembinaan ABDI YASA	Dinas Perhubungan
					Pelayanan terminal dan halte	Kordinasi peningkatan fasilitas pelayanan terminal dan halte	2 lokasi	3 lokasi	-	4 lokasi	5 lokasi	Dinas Perhubungan
			Meningkatkan tertib lalu lintas	Mengurangi angka kecelakaan	Rawan kecelakaan	Safe community	12 ruas	16 ruas	20 ruas	24 ruas	28 ruas	Dinas Perhubungan
				an	an	Pengadaan rambu lalu lintas	2999 buah	3148 buah	3306 buah	3471 buah	3645 buah	Dinas Perhubungan

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Tertib lalu lintas dan keselamatan an	Sosialisasi gerakan tertib lalu lintas dan keselamatan an ber kendaraan an	25 buah, sekolah	30 buah, sekolah	35 buah, sekolah	40 buah, sekolah	45 buah, sekolah	DISHUB, POLRESTA
						Penataan zona selamat sekolah, penyeberangan, dan traffic light	25 buah, 294 buah, 66 unit	33 buah, 308 buah, 69 unit	41 buah, 324 buah, 72 unit	49 buah, 340 buah, 80 unit	52 buah, 357 buah, 83 unit	Dinas Perhubungan
					Kemasya rakatan dan kelengkapan an	Sertifikasi bengkel kendaraan bermotor SIM						Badan Lingkungan Hidup POLRESTA
							300 x	315 x	325 x	340 x	350 x	POLRESTA

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					transportasi	Keliling	-	-	-	-	-	POLRESTA, DKP
						Pem bangunan taman lalu lintas						
						Car Free Day	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x	Dinas Perhubungan
				Menciptakan lalu lintas yang aman, dan nyaman	Penataan lalu lintas	Studi LHR (lalu lintas harian rata-rata)	100 ruas	120 ruas	140 ruas	150 ruas	160 ruas	Dinas Perhubungan
						Pengaturan sistem sirkulasi dan parkir	6 lokasi	8 lokasi	11 lokasi	14 lokasi	17 lokasi	Dinas Perhubungan
						Penataan jalur khusus	16.550 m2	17.377 m2	18.246 m2	19.158 m2	20.116 m2	Dinas Perhubungan

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						sepeda dan pejalan kaki						

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					informal (industri kecil/ rumah tangga)	kewirausahaan						
						Pembinaan UMKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM	DIPERIN DAG
						Fasilitasi inkubator bisnis bagi IKM	1x	1x	1x	1x	1x	DISPERIN DAG
					Keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan dan pembinaan dan kecelakaan an rudapaksa	Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum pada K3	50					DISNAKER
					Sosial Ekonomi, Budaya, dan	Pembinaan dan pembentukan P2K3	10					DISNAKER
						Pengembangan potensi unggulan daerah	1x20 org	1x20 org	1x20 org	1x20 org	1x20 org	DISPERIN DAG

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		budaya, dan ramah lingkungan	wisata sehat			Sarana Wisata						
					Obyek dan daya tarik wisata	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinas Pariwisata
				Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinas Pariwisata
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pembinaan kelompok sadar		1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	Dinas Pariwisata

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						wisata)						
					Sarana penunjang	Pengembangan sarana penunjang transportasi city tour	Rencana pengembangan dokar wisata keliling city tour	Penyelenggaraan dokar wisata city tour	Perencanaan pengelola manajemendokar wisata city tour	Pengelolaan dokar wisata	Evaluasi	Dinas Perhubungan
						Peningkatan kemudahan akses kegawatdaruratan	10	15	16	17	18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pemeliharaan jalan setapak dan pengisian pasir di sepanjang pantai						
			Men dorong terwujud nya SDM yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing	Meningkat kan pembinaan SDM yang berdaya saing	Pelayanan kesehatan	Inspeksi kelayakan pelayanan kesehatan	11 Puskes mas, 25 Pustu, 18 Rumah Sakit	12 Puskes mas, 25 Pustu, 18 Rumah Sakit	13 Puskes mas, 25 Pustu, 18 Rumah Sakit	14 Puskes mas, 25 Pustu, 18 Rumah Sakit	15 Puskes mas, 25 Pustu, 18 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
						Peningkatan pelayanan safe community						Badan Pe nanggulang an Bencana Daerah
					Kemasya rakatan	Pengembangan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Dinas Pariwisata

Visi: Denpasar Kota Sehat dan Cerdas 2021

Misi 3: Meningkatkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan

Tabel 4.3

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan	Tercapainya Ketahanan Pangan dan Gizi yang berkualitas	Menjamin pemenuhan pangan untuk gizi yang lebih berkualitas	Pemenuhan pangan untuk gizi yang lebih berkualitas	Ke tersediaan pangan	Penyusunan database potensi produksi pangan Pangan pascapanen dan pengolaan hasil pertanian Pengembangan diversifikasi tanaman Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura
							4 Keompok	4 Keompok	4 Keompok	4 Keompok	4 Keompok	Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura
							50 Are	50 Are	50 Are	50 Are	50 Are	Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura
							2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
						7	8	9	10	11	12	13
						Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	30	30	30	30	30	Dinas Koperasi
					Distribusi pangan	Operasi pasar dan peningkatan kordinasi dewan ketahanan pangan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura
						Distribusi pangan melalui asosiasi pasar tani (aspartan)	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura
					Konsumsi pangan masyarakat	Pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil	80 Balita, 28 Ibu Hamil	95 Balita, 30 Ibu Hamil	105 Balita, 35 Ibu Hamil	110 Balita, 40 Ibu Hamil	120 Balita, 45 Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
						Penanggulan KEP (kurang energi protein)	20 Balita	25 Balita	25 Balita	25 Balita	25 Balita	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
							8	9	10	11	12	13
							11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	Dinas Kesehatan
							1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Dinas Kesehatan
							210 KK/Desa	210 KK/Desa	210 KK/Desa	210 KK/Desa	210 KK/Desa	Dinas Kesehatan
							11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	Dinas Kesehatan
												BADAN KB DAN PP
							75%	80%	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan
							932 org	1025 org (+10%)	1118 org (+20%)	1211 org (+30%)	1304 org (+40%)	BNN
							85	100	100	100	100	KPA

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
							8	9	10	11	12	13
							11 Puskes mas	11 Puskes mas	11 Puskes mas	11 Puskes mas	11 Puskes mas	Dinas Kesehatan
							320	325	330	325	340	Dinas Kesehatan
							423 lokasi	423 lokasi	423 lokasi	423 lokasi	423 lokasi	Dinas Kesehatan
							1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	Dinas Tata Ruan dan Perumahan
							1 Keg	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Tata Ruangan dan Perumahan

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
						an kumuh perkotaan	8	9	10	11	12	13
						Penyusunan DED perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1 Lap	2 Lap	1 Lap	1 Lap		Dinas Tata Ruang dan Perumahan
						Perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	21 rumah	30 rumah	40 rumah	40 rumah	40 rumah	Dinas Tata Ruang dan Perumahan
						Penyuluhan pemanfaatan air tanah						PDAM
					Penyediaan air bersih	Perbaikan sistem distribusi air PDAM	Memperbaiki sistem distribusi di Kota Denpasar	Mengatur pengaliran menjadi 3 Zona Wilayah	Mengatur pengaliran menjadi 3 Zona Wilayah	Mengatur pengaliran menjadi 3 Zona Wilayah	Mengatur pengaliran menjadi 3 Zona Wilayah	PDAM

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
						8	9	10	11	12	13	PDAM
							Pem entukan Zoning Blok					
						50	Peningkat an pengawas an, perlindung an, dan penegakan hukum pada K3					DISNAKER
						10	Pembinaan dan pembentuk an P2K3					DISNAKER
						100	Penyedia an pelayanan KB dan Alat Kontra sepsi bagi keluarga miskin		100	100	100	BADAN KB DAN PP
						100	Pelayanan Konseling KB		100	100	100	BADAN KB DAN PP

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
							8	9	10	11	12	13
							100	100	100	100	100	BADAN KB DAN PP
							100	100	100	100	100	BADAN KB DAN PP
							100	100	100	100	100	BADAN KB DAN PP
							100	100	100	100	100	BADAN KB DAN PP
							100	100	100	100	100	BADAN KB DAN PP
							100	100	100	100	100	BADAN KB DAN PP

1	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Gerakan Sayang Ibu dan Anak Baru Lahir	Penyuluhan ASI Eksklusif	100	100	100	100	100	BADAN KB DAN PP
						Pembinaan GSI	100	100	100	100	100	BADAN KB DAN PP
					Pembinaan kesehatan jiwa masyarakat dan pola asuh anak	Pembinaan sekolah autis						DINSOS
						Pelayanan konseling gangguan kesehatan mental						DINSOS
						Posyandu						Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni	Menyediakan atlet berprestasi	559 org	625 org	650 org	675 org	700 org	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
					Porsenijar Kecamatan	Menyediakan atlet berprestasi tingkat kecamatan	459 org	525 org	550 org	575 org	600 org	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					13
							2017	2018	2019	2020	2021	
					Mengikuti Kegiatan O2 SN tingkat provinsi dan Nasional	Menyediakan atlit Kota Denpasar	76 org	85 org	100 org	125 org	150 org	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
						Penetapan kawasan tanpa rokok	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
					Program anti tembakau	Sosialisasi kawasan tanpa rokok	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
						Pembentukan klinik berhenti merokok	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
						Pelayanan imunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
						Sosialisasi imunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
					Imunisasi	Sosialisasi Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) oleh guru sekolah dasar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
							8	9	10	11	12	13
							11 Puskes mas	11 Puskes mas	11 Puskes mas	11 Puskes mas	11 Puskes mas	Dinas Kesehatan
							43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	BPM DAN PD
							48 Desa/Kel	48 Desa/Kel	48 Desa/Kel	48 Desa/Kel	48 Desa/Kel	BPM DAN PD
							12 kelompok di ds/kl	12 kelompok di ds/kl	12 kelompok di ds/kl	12 kelompok di ds/kl	12 kelompok di ds/kl	BPM DAN PD
							17 Lokasi di Dusun/ Lingk.	17 Lokasi di Dusun/ Lingk.	17 Lokasi di Dusun/ Lingk.	17 Lokasi di Dusun/ Lingk.	17 Lokasi di Dusun/ Lingk.	BPM DAN PD
							2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	BPM DAN PD
												Dinas Kesehatan
							43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
							8	9	10	11	12	13
							474 orang	474 orang	474 orang	474 orang	474 orang	Dinas Kesehatan
							43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	43 Ds/Kel	Dinas Kesehatan
							11 Puskesmas mas	11 Puskesmas mas	11 Puskesmas mas	11 Puskesmas mas	11 Puskesmas mas	Dinas Kesehatan
							11 Puskesmas mas, 14 RS	11 Puskesmas mas, 14 RS	11 Puskesmas mas, 14 RS	11 Puskesmas mas, 14 RS	11 Puskesmas mas, 14 RS	Dinas Kesehatan
							132 Penderita	132 Penderita	132 Penderita	132 Penderita	132 Penderita	Dinas Kesehatan

1	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kegiatan pengembangan kreativitas anak terlantar	200 anak	200 anak	200 anak	200 anak	200 anak	Dinas Sosial
					Penanganan keterlantar an: anak, lanjut usia/ jompo	Kegiatan peningkatan produktivitas usia lanjut	-	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	Dinas Sosial
						Penyediaan tempat bagi anak terlantar dan lanjut usia/jompo	16	16	16	16	16	Dinas Sosial
					Penanganan korban bencana, kekerasan (anak, wanita, usia lanjut), dan kerusuhan	Pelatihan dan simulasi penanganan bencana	150 Orang	200 Orang	250 Orang	300 Orang	350 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Peningkatan kualitas SDM penanganan bencana	230 Orang	230 Orang	230 Orang	300 Orang	350 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Penyuluhan dan pencegahan bencana	11.500 Orang	11.500 Orang	11.500 Orang	11.500 Orang	11.500 Orang	Badan Penanggulangan Bencana

1	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							206 Orang	206 Orang	206 Orang	206 Orang	206 Orang	Daerah
						Pengembangan, balana, balawista dan PMI	206 Orang	206 Orang	206 Orang	206 Orang	206 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Sosialisasi pencegahan kekerasan dan kerusuhan melalui media masa dan elektronik	-	-	-	-	-	DINSOS
						Rehabilitasi korban kekerasan	-	-	-	-	-	DINSOS
						Rehabilitasi korban kerusuhan	-	-	-	-	-	DINSOS
						Peningkatan peran KPAI	-	-	-	-	-	DINSOS

Visi: Denpasar Kota Sehat dan Cerdas 2021

Misi 4: Mewujudkan tata kelola kota sehat yang akuntabel, transparan, dan partisipatif

Tabel 4.4

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab	
							2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Meningkatkan peranan stake holders dalam mengelola kota sehat	Tercapainya tupoksi tim pembina dan tim teknis	Mengembangkan integrasi, sinkronisasi program kota sehat dengan program pembangunan	Membina penyelenggaraan kota sehat sesuai dengan kewenangan	Perencanaan	Perumusan kebijakan kota sehat	1	1	1	1	1	1	Tim Pembina Dan Tim Teknis
						Perumusan standar indikator dan tatanan kota sehat	1	1	1	1	1	1	Tim Pembina Dan Tim Teknis
						Penyusunan program kota sehat yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah	1	1	1	1	1	1	Tim Pembina Dan Tim Teknis
						Menyelenggarakan forum diskusi, lokakarya dan seminar	1	1	1	1	1	1	Tim Pembina Dan Tim Teknis
					Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan Monev program kota sehat	1	1	1	1	1	Tim Pembina Dan Tim Teknis	
		Tercapainya tupoksi	Mensinkronkan tata kelola kota	Mengkoordinasikan	Perencanaan	Merumuskan usulan, prioritas, sasaran program kota sehat	1	1	1	1	1	Forum Kota Sehat	

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
							8	9	10	11	12	13
		forum kota sehat	sehat di tingkat kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan	penyelengaraan kota sehat di tingkat kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan		Merumuskan dan membangun kemitraan dalam pembiayaan program kota sehat	1	1	1	1	1	Forum Kota Sehat
						Penyusunan database tatanan kota sehat dalam rangka penilaian kota sehat	1	1	1	1	1	Forum Kota Sehat
					Pe laksana an	Melaksanakan kordinasi secara berkala	4	4	4	4	4	Forum Kota Sehat
						Pengisian database tatanan kota sehat dalam rangka penilaian kota sehat	1	1	1	1	1	Forum Kota Sehat
					Monito ring dan evaluasi	Melaksanakan Monev program kota sehat	4	4	4	4	4	Forum Kota Sehat
						Menyiapkan bahan penilaian kota sehat	1	1	1	1	1	Forum Kota Sehat
		Tercapai nya tupoksi forum komuni	Mensinkron kan tata kelola kota sehat di tingkat	Mengkordi nasikan penyeleng garaan kota sehat	Pe rencana an	Merumuskan rencana kerja kota sehat di tingkat Kecamatan	1	1	1	1	1	Forum Komukasi Desa/ Kelurahan Sehat

1	2	3	4	5	6	7	Target Rencana Aksi					Penanggung jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	
							8	9	10	11	12	13
		kasi desa/kelurahan sehat	Kecamatan, Desa/Kelurahan	di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	Pe-laksanaan	Koordinasi pelaksanaan program kota sehat di tingkat Kecamatan	4	4	4	4	4	Forum Komukasi Desa/Kelurahan Sehat
					Monitor-ing dan Evaluasi	Pelaporan pengisian data program kota sehat di tingkat Kecamatan	4	4	4	4	4	Forum Komukasi Desa/Kelurahan Sehat
		Tercapai na tupoksi kelompok kerja desa/kelurahan sehat	Mensinkron kan tata kelola kota sehat di tingkat Desa/Kelurahan	Mengkordi nasikan penyeleng garaan kota sehat di tingkat Desa/Kelurahan	Pe-rencana-an	Merumuskan rencana kerja kota sehat di tingkat Desa/Kelurahan	1	1	1	1	1	Forum Pokja Desa/Kelurahan Sehat
					Pe-laksanaan	Koordinasi pelaksanaan program kota sehat di tingkat Desa/Kelurahan	4	4	4	4	4	Forum Pokja Desa/Kelurahan Sehat
					Monitor-ing dan Evaluasi	Pelaporan pengisian data program kota sehat di tingkat Desa/Kelurahan	4	4	4	4	4	Forum Pokja Desa/Kelurahan Sehat

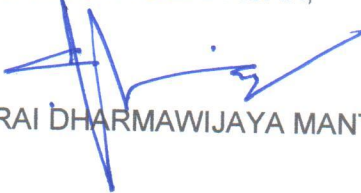
Penutup

Denpasar sebagai Kota Metropolitan menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dalam pembangunan. Tidak terkecuali dalam pembangunan dan pengembangan Kota Sehat. Pembangunan kota sehat merupakan bagian dari dinamika dan semangat warga, serta lembaga legislatif. Pencapaian Kota Sehat merupakan proses yang berjalan terus menerus terutama dalam hal menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, budaya maupun pengembangan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi masyarakat.

Untuk mencapai kota sehat yang ideal diperlukan berbagai upaya yang terpadu antara berbagai stakeholder, ini artinya cara yang digunakan adalah dengan memberdayakan masyarakat agar saling mendukung dalam menerapkan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi maksimal suatu Kota.

Rencana aksi sebagai suatu rencana yang bersifat operasional dalam pembangunan kota sehat diharapkan dapat menjadi pegangan bagi semua stakeholder, karena melalui rencana aksi ini sudah jelas apa yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing stakeholder guna mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA